

No. **126** Juni - Juli 2016

www.bakti.or.id

BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



Lika-Liku Listrik di Kamanggih
Twists and Turns of
Electric Power in Kamanggih

Memperkuat Peran Sosial
Kesatuan Pengelolaan Hutan

Buruh Tembakau Anak-anak
Menderita Demi Keuntungan
Perusahaan Terkena bahaya
nikotin, pestisida

Replikasi Praktik Cerdas
melalui kegiatan
Berbagi Pengetahuan

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771 979 777 057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Editor **CAROLINE TUPAMAHU**
VICTORIA NGANTUNG
SYAIFULLAH
Suara Forum KTI **ZUSANNA GOSAL**
ITA MASITA IBNU
Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**
Website **ADITYA RAKHMAT**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**
Database
Kontak **A. RINI INDAYANI**
Design & layout
Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146
Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS **BaKTINews 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**
Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTI**News**

Juni - Juli 2016

No. **126**

MCA-Indonesia
Masih Relevankah
Sistim Pertanian Masa Lalu
di Masa Sekarang?
*Questioning the Relevance of
Past Agricultural System
for Current Application*

Desa Pasang, 'Surga' bagi
Burung Bangau di Sulsel
Oleh **Wahyu Salik Chandra**

Gurita tak Hidup
di Kolam Susu
Oleh **Arpan Rachman**

Lingkungan
Memperkuat Peran Sosial
Kesatuan Pengelolaan Hutan
Oleh **Azmi Sirajuddin**

Sosok
Tenri,
Jurnalis, Aktivis, dan Birokrat
Oleh **M. Ghufuran H. Kordi K.**

1

9

13

16

19

23

27

35

39

40

41

Buruh Tembakau
Anak-anak Menderita Demi
Keuntungan Perusahaan
Terkena bahaya nikotin,
pestisida

Lika-Liku Listrik di Kamanggih
*Twists and Turns of
Electric Power in Kamanggih*
Oleh **Syaifullah**

Replikasi Praktik Cerdas
melalui kegiatan
Berbagi Pengetahuan

Update BatukarInfo

Kegiatan BaKTI

Info Buku

Keluarga Besar
Yayasan Bursa Pengetahuan
Kawasan Timur Indonesia

Selamat Hari Raya
Idul Fitri

1 Syawal 1437 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin

CATATAN DARI DISKUSI PRAKTIK CERDAS DI WAINGAPU
Notes from Smart Practice Discussion in Waingapu

Masih Relevankah Sistim Pertanian Masa Lalu di Masa Sekarang?

*Questioning the Relevance
of Past Agricultural System
for Current Application*



Jangan-jangan kita memang tidak butuh lagi cara pertanian masa lalu? Toh dengan cara pertanian moderen hasilnya juga lebih banyak,” Kata Yonathan Haui, seorang anggota DPRD Sumba Timur.

Pertanyaan menohok itu diajukan Yonathan di akhir acara Diskusi Praktik Cerdas Hijau yang mengambil tema; **Mengenal Kembali Sistem Ketahanan Pangan Masa Lalu Untuk Pertanian Berkelanjutan Masa Kini**. Diskusi tersebut dihelat di Hotel Tanto, Waingapu, Sumba Timur hari Selasa 19 April 2016.

Diskusi dihadiri puluhan peserta dari berbagai kalangan. Petani, ibu rumah tangga, praktisi pertanian, pemerintah desa, wakil pemerintah daerah hingga anggota dewan. Tampil sebagai pembicara utama adalah Florianus Paulus Ngera atau yang akrab disapa Umbu Nababan, seorang aktivis lingkungan yang juga aktif sebagai pendamping pandu di Konsorsium Hijau. Pembicara lainnya adalah Ida Bagus Punia, kepala dinas pertanian Kabupaten Sumba

“We need to address if we still need to resort to old ways of agricultural practices. It has been proven we have generated more production by resorting to modernised practices.” said Yonathan Haui, a local parliament member of East Sumba District.

The above statement serves as an alarming reality presented by Yonathan in the Green Smart Practice discussion with the central theme of “Refamiliarizing Past Food Security System for Current Sustainable Agriculture.” This event was conducted at Hotel Tanto, Waingapu, District of East Sumba on Tuesday, 19 April 2016.

This discussion event participated by a number of elements within the society. Among them were farmers, homemakers, agricultural practitioners, local village governments, representatives of local governments and members of local parliaments. Florianus Paulus Ngera, or also known as Umbu Nababan, an environmental activist, who is also active in Green Consortium as local guidance served as the



Ilustrasi : Ichsan Djunaed



Foto Dok. Yayasan BaKTI

Dengan sistim yang dikenal bernama *Marapu*, orang Sumba dengan kearifan lokal dan kedekatannya pada alam mempraktikkan sistim tanam ramah lingkungan.

Timur. Sementara itu Luna Vidya dari Yayasan BaKTI tampil sebagai moderator.

Umbu Nababan memulai diskusi hari itu dengan memaparkan beragam praktik ketahanan pangan lokal orang Sumba. Menurutnya orang Sumba sudah lama mempraktikkan sistim organik dalam bercocok tanam. Dengan sistim yang dikenal bernama *Marapu*, orang Sumba dengan kearifan lokal dan kedekatannya pada alam mempraktikkan sistim tanam ramah lingkungan. Mereka sudah terbiasa melakukan sistim tumpang sari, satu lahan bisa diisi empat sampai lima jenis tanaman.

Jagung asli Sumba juga adalah hasil dari proses panjang tersebut. Sehabis panen, jagung bisa disimpan selama berbulan-bulan sebagai cadangan di musim paceklik. Jagung itu diikat di tiang-tiang rumah di dekat atap, bahkan diikat di pohon kelapa di halaman rumah.

primary resource person during this event. Ida Bagus Punia, Head of Dinas of Agriculture of East Sumba District also served as resource person during the event, while Luna Vidya of Yayasan BaKTI served as moderator of the discussion.

Umbu Nababan started the discussion by elaborating on a number of local food security practices maintained by Sumbanese people. According to Umbu, local people of Sumba have practised the organic farming system. With a distinct system known as Marapu, Sumbanese people, with their local wisdom and their relationships with nature by applying the method of environmentally-friendly farming system. The people of Sumba has been accustomed to the practice of intercropping, which is growing four or more crops among plants of a different kind within a space of land.

With a distinct system known as Marapu, Sumbanese people, with their local wisdom and their relationships with nature by applying the method of environmentally-friendly farming system



Foto Dok. Yayasan BaKTI

Hewan ternak orang Sumba juga tidak diikat atau dikandangkan melainkan dilepas begitu saja. Salah satu kegunaannya adalah kotoran hewan tersebut bisa langsung dijadikan pupuk yang menyuburkan tanaman.

Salah satu sistem ketahanan pangan lain khas orang Sumba menurut Umbu Nababan adalah Mandara. Sebuah kesepakatan bersama dalam sebuah komunitas di mana beberapa orang akan membantu anggota komunitas mereka yang kesulitan pangan di musim paceklik.

“Ini bukan mengemis, tapi ini sistem kekerabatan yang dilandaskan pada rasa kekeluargaan,” kata Umbu Nababan.

Menurutnya sistem ketahanan pangan khas orang Sumba itu perlahan mulai tergerus dengan banyaknya nilai-nilai baru yang masuk. Mulai dari beragam bibit yang didatangkan dari Jawa dan sebenarnya tidak cocok dengan tanah dan iklim Pulau Sumba sampai sistem ekonomi yang mengedepankan materi daripada kekeluargaan. Menurut Umbu Nababan, masuknya negara yang menciptakan sistem administrasi sedikit banyaknya ikut berpengaruh menghapus sistem ketahanan pangan berbasis wilayah yang sudah dilakukan orang Sumba sejak berabad-abad.

Membanjirnya pangan dari luar Sumba seperti beras juga diyakini Umbu Nababan membuat peta kebutuhan pangan orang Sumba berubah. Padi

Sumbanese maize constitutes a result of the long process above. After being harvested, the corn could be stored for months to reserve for drought season. These corns are tied onto the poles close to the rooftops of the local houses, as some are tied onto the coconut trees in the front yard.

In addition, livestock of the people of Sumba are not tied or locked in a pen, as they are being freed to graze in open fields. This method is used so the animals manure can be used as fertiliser for the plants.

Another authentic system of local food security of Sumba, according to Umbu Nababan is a method named Mandara. Mandara is a consensus within a community where several individuals will assist other elements of their community who experience hardships of food during the dry season.

“This is not an act of begging. Instead this is a sense of communal belonging on the basis of kinship,” said Umbu Nababan.

Furthermore in his delivery, Umbu Nababan added that the distinctive methods of local food security of the Sumbanese are slowly becoming eroded by the newly incoming values to the island. For instance, there are seeds imported from Java, which is not suitable for the type of soil and climate of Sumba Island, to the economic system which highlights more on the material as opposed to the entrenching kinship values. According to Umbu



Foto Dok. Yayasan BaKTI

Sistim ketahanan pangan khas orang Sumba itu perlahan mulai tergerus dengan banyaknya nilai-nilai baru yang masuk. Mulai dari beragam bibit yang didatangkan dari Jawa dan sebenarnya tidak cocok dengan tanah dan iklim Pulau Sumba sampai sistim ekonomi yang mengedepankan materi daripada kekeluargaan.

yang mulai masuk sejak tahun 1800an dan makin massif di tahun 1970an membuat orang Sumba mulai tergantung pada bahan pangan tersebut dan meninggalkan pangan asli mereka seperti jagung dan sorgum. Contoh lainnya adalah jagung hibrida, jenis jagung yang sebenarnya lebih rentan dari jagung asli Sumba. Justru jagung hibrida ini yang membanjiri tanah Sumba, menggeser jagung asli yang lebih tahan.

Di kesempatan berbeda, kepala dinas pertanian Sumba Timur, Ida Bagus Punia menuding perubahan iklim drastis yang menjadi biang keladi masalah ketahanan pangan di Sumba. Menurutnya, masalah terbesar pertanian di Sumba ada pada ketersediaan air yang semakin sulit karena adanya perubahan iklim yang drastis. Kadang kala hujan berhenti saat padi baru mulai tumbuh, tahun ini saja dikuatirkan Kecamatan

Nababan, the state's commencing influence has created administration system, which affecting to the declining local-based food security system, a system that has been applied by the Sumbanese for centuries.

Umbu Nababan also notes that the current food overload from other areas into Sumba, such as rice has caused a shift in the requirement of food for the local people of Sumba. Rice, who was introduced since the 1800s, has been massively consumed by 1970s, which caused a dependency of the local residents upon the crop, leaving behind their primary source of food such as maize and sorghum. Other sample includes hybrid corns, which are more vulnerable than Sumba's distinct corn variety. This hybrid species has been grown massively in Sumba, eliminating the original corn

the distinctive methods of local food security of the Sumbanese are slowly becoming eroded by the newly incoming values to the island. For instance, there are seeds imported from Java, which is not suitable for the type of soil and climate of Sumba Island, to the economic system which highlights more on the material as opposed to the entrenching kinship values



Foto Dok. Yayasan BaKTI

Lewa akan gagal panen karena krisis air tersebut.

Dalam jangka pendek menurut Ida Bagus Punia hal yang bisa dilakukan pemerintah kabupaten adalah mencari sumber air terdekat yang bisa digunakan untuk menghidupi sawah dan ladang warga.

Nasib Petani Sumba

Dalam diskusi ini juga mencuat beragam keluhan, kritikan dan cerita tentang petani di Sumba. Beberapa petani mengeluhkan bantuan pupuk dari pemerintah yang mereka terima. Menurut mereka, bantuan tersebut diberikan begitu saja tanpa adanya pelatihan yang memadai tentang bagaimana memanfaatkan pupuk tersebut.

Dengan sedikit tajam, seorang peserta diskusi bernama ibu Martha bahkan mengkritik kenapa bantuan pupuk tersebut harus didatangkan dari luar Sumba? Menurutnya Sumba sendiri punya potensi untuk membuat dan mengembangkan pupuk sendiri, lebih hemat dan tetap sasaran menurutnya.

“Kita terlalu banyak motivator, tapi kurang aplikator,” kata Rahmat Adinata, seorang peserta diskusi lainnya. Menurutnya, para petani di Sumba sudah terlalu sering diberi motivasi tentang cara bercocok tanam, tapi tidak banyak pendamping yang benar-benar bisa mendampingi mereka

species which are seen more resistant.

On the other hand, Head of Dinas of Agriculture of East Sumba District, Ida Bagus Punia suspects a drastic climate change to be the culprit of food security problems in Sumba. According to him, the primary problem of agriculture in Sumba lies upon availability of water which has grown scarce due to drastic climate change. Ida Bagus states that the rain suddenly stops at the time where rice has started to grow, and it is becoming a great concern for the Sub-District of Lewa to experience harvesting failure this year due to the given water crisis.

In an immediate timeframe, according to Ida Bagus Punia, the most pressing action for district government is to find a close water source to accommodate local fields and farming.

The plight of Sumbanese farmers

A number of complaints, critics, and stories have also raised during the course of this discussion, provided by local Sumbanese farmers. Several of the attending farmers complained about fertilisers supplied by the government which they have received. According to these farmers, the fertilisers were given sporadically without any proper training on how to gain maximum benefits of the fertilisers.

In a slightly harsh undertone, a discussion



Foto Dok. Yayasan BaKTI

Kalau petani cerdas, otomatis swasembada pangan akan bisa diraih

mengaplikasikan beragam pengetahuan tersebut. Bahkan penyuluh pertanian sekalipun, ujarnya.

Rahmat Adinata juga menyoroti bantuan fisik kepada petani. Menurutnya bantuan fisik tersebut selayaknya dibarengi dengan bantuan berupa pengetahuan. Memulaikan petani adalah sebuah keharusan menurut Rahmat Adinata.

“Kalau petani cerdas, otomatis swasembada pangan akan bisa diraih,” ujarnya.

Diskusi makin tajam dan menghangat ketika pembicaraan mulai bergeser kepada nasib para petani di Sumba. Menurut Umbu Nababan, sebagian besar orang jaman sekarang masih menganggap menjadi petani adalah pilihan terakhir ketika mereka sudah tidak bisa bekerja kantoran atau menjadi pegawai negeri sipil. Tidak heran kalau profesi petani menjadi salah satu profesi yang sebisa mungkin dihindari, apalagi untuk anak-anak mudajaman sekarang.

Usaha untuk mengubah stigma tersebut mengemuka, usaha untuk menjadikan petani sebagai profesi terhormat dan bukan lagi pilihan terakhir. Beragam usulan mencuat dari peserta, termasuk bagaimana meningkatkan kualitas berpikir para petani sehingga mereka juga bisa meningkatkan

participant named Mrs Martha criticised by asking why the fertilisers have to be imported from areas out of Sumba? According to her, Sumba has a great potential to develop their own fertilisers, which might be more efficient and right on target.

“We have too many motivators, and we have fewer executors,” said Rahmat Adinata, another discussion participant. Rahmat asserts that there have been too many motivational and endorsements were given to farmers in Sumba regarding agriculture, but these assistance has not been fully able to apply the knowledge into application. This also applies for the agricultural instructors, he added.

Rahmat Adinata also highlighted physical support to the farmers. He states that the material support is to be supplemented by other forms of knowledge assistance. Commencing a farmer's work is a necessity, according to Rahmat Adinata.

“Should farmers are equipped with proper knowledge, self-sufficiency is feasible to apply,” he added.

The discussion escalated when the topic was shifted to the plight of Sumbanese farmers. According to Umbu Nababan, most people still perceive being farmers as the last resort of occupation when they are unable to work in office or being civil servants for the government. It is not surprising that the profession of farmer is seem to be avoided, especially for young people.

The effort of changing this stigma was proposed during the discussion, by a number of participants commenting that farmers are noble profession and is no

Should farmers are equipped with proper knowledge, self-sufficiency is feasible to apply



Foto Dok. Yayasan BaKTI

kualitas hasil pertanian mereka dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup.

Diskusi hari itu ditutup dengan pertanyaan tajam dari Yonathan Haui seperti yang tertulis di paragraf awal. Anggota DPRD yang masih muda itu menanyakan pentingnya mencari tahu sistem ketahanan pangan masa lalu Sumba dan apakah masih relevan dengan perkembangan jaman sekarang?

Dalam beberapa kasus-termasuk testimoni beberapa petani yang hadir hari itu-pertanian moderen ternyata bisa juga diadaptasi oleh mereka. Tanpa harus menggunakan metode lama pun mereka ternyata berhasil meningkatkan kualitas pertanian, termasuk menggunakan jagung hibrida yang berasal dari luar Sumba. Yonathan juga mengkritik penyelenggara diskusi yang menurut dia seharusnya mendatangkan petani yang sukses menerapkan sistem pertanian tradisional sesuai tema diskusi.

Pertanyaan dan kritikan itu cukup menggelitik, apalagi dilemparkan menjelang akhir diskusi. Mungkin saja sistem pertanian moderen tidak selamanya buruk, tapi tetap butuh penelitian panjang untuk membuktikan seberapa besar pengaruh positif atau negatifnya pada pertanian di Sumba pada umumnya.

longer perceived as last resort. A number of suggestion was raised by participants, including how to improve the perspective of the farmers so they are able to improve the quality of their agricultural practices, which in the end will lead to improvement of life quality.

The discussion was seized by sharp question by Yonathan Haui as stated in the first paragraph. The young member of local parliaments asked the importance to find out whether past practices of food security of Sumba are still seen relevant given the current circumstances.

In several cases, including testimonials of the attending farmers during the event, they are able to adapt to the modern agricultural practices. Without having to use old methods, they have managed to elevate the quality of their agricultural production, which include using hybrid maize from other areas of Sumba. Yonathan also criticised the event administrator who according to him, should invite farmers who have been successful in applying traditional agricultural methods, which should be in relevance with the theme of today's discussion.

These questions and criticisms have been enlightening, as they were being delivered toward the end of the discussion. It might seem that modern agricultural system is not-at-all wrong, however needing more rigorous research to address their positive or negative influences upon Sumbanese general agricultural practices.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai Aktivitas Pengetahuan Hijau - Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia, hubungi info@bakti.or.id

Desa Pasang, 'Surga' bagi Burung Bangau di Sulsel

Oleh **Wahyu Salik Chandra**

Desa Pasang yang terletak di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan termasuk desa yang subur dan makmur dengan penataan ruang yang apik. Sepanjang jalan tertata rapi dan bersih.

Desa ini juga memiliki aturan konservasi yang melarang warganya melakukan perburuan burung kuntul atau sejenis burung bangau kecil, yang memang banyak ditemukan di daerah tersebut.

Tak heran jika kita berkunjung ke desa ini di sepanjang jalan tiba-tiba akan terlihat kerumunan satwa yang tergolong dalam family Ardeidae ini. Tidak hanya di pohon-pohon



dan di pinggir jalan, bahkan di pekarangan rumah warga pun dengan mudah kita akan menemukannya. Daerah ini telah menjadi surga bagi burung berparuh panjang ini.

Untuk menuju desa ini dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari Kota Enrekang, melewati jalan yang berliku dan berlubang parah di beberapa titik. Di sekeliling adalah daerah hamparan sawah yang hijau. Sebagian merupakan sawah tadah hujan karena kondisi lahan yang berbukit.

Desa Pasang sendiri merupakan pusat dari komunitas adat Pasang, dengan tiga desa sekitarnya. Komunitas adat ini cukup dikenal dengan khazanah budaya dan adat istiadatnya yang masih terjaga. Ketika kami tiba di rumah kepala desa, masih terlihat sebuah ayunan besar di tanah lapang depan rumah kepala desa. Sisa dari pelaksanaan ritual adat yang disebut maccera manuring beberapa bulan sebelumnya.

Rustan Arsyad, Kepala Desa Pasang menyambut kami dengan pakaian yang masih berlumpur. Di kejauhan terlihat belasan warga tampak sedang membersihkan saluran pembuangan air.

“Kami tadi kerja bakti karena kebetulan desa kami kemarin terpilih sebagai desa terbaik di Enrekang dan akan mewakili di tingkat Sulsel. Biasanya juga di hari Minggu kami memang sudah jadwalkan untuk kerja bakti seperti ini,” ungkap Rustan menyambut kami dengan senyum ramah, pada Minggu (15/05/2016).

Rustan adalah seorang yang ulet. Sejak terpilih sebagai kepala desa tahun 2013 lalu ia banyak mengeluarkan kebijakan untuk perbaikan kualitas desa. Salah satunya adalah mewajibkan warga untuk menjaga kebersihan di sekitar jalan dan pekarangan rumahnya.

“Setiap pagi saya jalan untuk periksa jalan-jalan desa. Kalau ada sampah di jalan langsung dibersihkan. Warga yang melihat pasti malu, jadi akan ikut membersihkan juga,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Rustan lah yang menginisiasi lahirnya Peraturan Desa tentang Larangan Berburu Burung, terkhusus pada burung bangau atau kuntul, memperkuat aturan adat yang telah ada sebelumnya.

Desa Pasang sebagai pusat dari wilayah komunitas adat Pasang memiliki kondisi lahan yang beragam, dari datar hingga berbukitan.

Sebagian besar warganya merupakan petani sawah dan kebun. Penataan desa yang baik dan bersih, ditopang oleh partisipasi warga yang baik membuatnya terpilih sebagai desa terbaik di Kabupaten Enrekang

Foto: Wahyu Salik Chandra



“Ini sebenarnya sudah diatur dalam adat. Kita hanya memperkuat saja apa yang sudah ada, karena ini memang keberadaan burung itu sangat penting. Cuma memang dalam Perdes itu belum menjelaskan secara spesifik, namun intinya pada larangan.”

Rustan lalu menunjukkan lokasi dimana burung itu banyak ditemukan. Sebuah kawasan aliran sungai kecil yang banyak ditumbuhi bambu.

“Tak jauh dari sini, jalan saja lurus ke atas pendakian itu. Kalau sudah ketemu rumpun bambu di belakang rumah batu, di situ lah tempatnya.”

Benar saja, di tempat yang dimaksud Rustan, dari kejauhan sudah terlihat puluhan burung berwarna putih beterbangan di sekitar rumpun bambu. Beberapa ekor bahkan terlihat bertengger di puncak bambu. Ada juga beterbangan di jalanan dan di pekarangan rumah warga.

Armin, warga Pasang, yang kebetulan rumahnya berada di sekitar rumpun bambu itu lalu menunjukkan lokasi dimana biasanya telur burung ini ditemukan telah menetas karena terjatuh dari pohon.

“Biasanya banyak berjatuhan karena pengaruh angin yang membuat bambu bergoyang. Biasanya

Burung Bangau dengan mudah ditemukan di pinggir jalan ataupun pekarangan rumah di Desa Pasang, Enrekang, Sulsek tanpa ada gangguan atau penangkapan dari warga. Ada sanksi adat bagi warga ataupun orang luar desa yang melakukan perburuan

Foto: Wahyu Chandra

banyak di sini telur-telur jadi makanan babi hutan,” jelasnya.

Menurut Armin, burung-burung tersebut akan jauh lebih banyak lagi di waktu petang dan malam hari. Konon puncak pohon bambu itu akan berwarna putih karena dipenuhi ribuan bangau atau kuntul tersebut.

“Kalau siang-siang begini mereka keluar cari makan dan baru pulang menjelang malam,” katanya.

Kalau dilihat dari penggambarannya, dua jenis burung yang dimaksud Armin ini kemungkinan adalah kuntul kerbau (*Bubulcus ibis*) atau coka dalam bahasa lokal coka, dan *Mycteria leucocephala* atau campong yang bercorak hitam. Armin sendiri mengaku tak pernah membunuh burung tersebut atau sekedar mengambil telurnya, meski rumahnya menjadi sarang.

Bangau atau kuntul ini dapat bersimbiosis dengan hewan-hewan lain, misalnya membantu memakan kutu di kerbau atau sebagai predator bagi hama ulat dan siput di sawah. Jadi tanpa kelihatan ini sudah sangat membantu masyarakat

“Dulunya mereka tinggal di pohon anetu yang berduri itu, yang banyak di pinggir sungai. Setelah pohonnya tumbang karena pengaruh arus air, burung-burung itu mulai pindah ke rumpun bambu. Selain di sini juga ada di atas sana,” katanya sambil menunjuk ke bagian desa yang lain.

Menurut Armin, meski jumlahnya ribuan, keberadaan burung itu tidak menjadi gangguan bagi warga, malah sangat membantu karena memangsa ulat-ulat dan keong di sawah.

“Paling mereka bikin padi rubuh. Tapi bagus lagi setelah diperbaiki.”

Keberadaan burung bangau dalam jumlah besar itu, diakui Armin, biasanya hanya terjadi di waktu-waktu tertentu saja, yaitu di musim hujan, sementara di musim kemarau biasanya akan kurang.

“Kalau musim kemarau mereka pergi mencari tempat lain entah di mana. Paling yang tinggal hanya burung yang ada warna hitam di ekornya itu,” tambahnya.

Larangan Adat

Menurut Rustan, keberadaan bangau yang terjaga itu sebenarnya dulu hampir punah karena perburuan liar dari orang-orang dari luar desa. Melihat kondisi tersebut, Ketua Adat Pasang yang pada saat itu dijabat La Nurung mulai khawatir yang kemudian membuat larangan.

La Nurung, mantan Ketua Adat berusia 80-an tahun, mengatakan aturan tersebut diberlakukan karena fungsi ekologis dan keterancaman populasi bangau. Papan larangan dipasang di daerah perburuan.

“Dulu larangan itu dipasang di bambu-bambu. Sejak saat itu tak ada lagi orang luar yang datang berburu. Dulu juga ada anak-anak yang memanjat untuk ambil telurnya tapi mereka berhenti setelah dilarang,” katanya.

Peran Bangau

Yusri, Kepala Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulse, menilai positif upaya konservasi Bangau tersebut.

“Kita sangat men-support adanya upaya seperti itu. Ini malah bisa dijadikan sebagai model percontohan bagi daerah-daerah lain. Hal seperti ini juga penting untuk dipublikasikan secara luas kepada masyarakat,” katanya.

Yusri selanjutnya berjanji akan mengunjungi Desa Pasang untuk kajian awal dan berharap bisa menjadikannya sebagai binaan BKSDA.

Menurut Ria Saryanthi, Head of Communication and Knowledge Center Burung Indonesia, keberadaan Bangau yang terjaga dan terlindungi dengan baik tanpa disadari memang telah banyak membantu masyarakat itu sendiri.

“Bangau atau kuntul ini dapat bersimbiosis dengan hewan-hewan lain, misalnya membantu memakan kutu di kerbau atau sebagai predator bagi hama ulat dan siput di sawah. Jadi tanpa kelihatan ini sudah sangat membantu masyarakat,” katanya.

Ria juga tak khawatir terjadinya ledakan populasi akibat adanya larangan perburuan tersebut, karena secara alami akan terjadi proses keseimbangan alam.

“Alam akan mengatur bagaimana keseimbangan itu terjadi, bisa dengan adanya predator lain atau kondisi-kondisi lain yang bisa mencegah terjadinya ledakan populasi. Justru campur tangan manusia lah yang kerap menjadi penyebab rusaknya keseimbangan tersebut.”

Adanya masyarakat yang secara sadar kemudian melakukan upaya-upaya perlindungan dinilai Ria sebagai inisiatif yang perlu didukung dengan cara menceritakan inisiatif-inisiatif itu di daerah lain.

“Ini cerita menarik dan bisa dipromosi ke daerah lain. Semoga ada daerah lain juga bisa terbuka seperti halnya di Desa Pasang ini.”

Ria menyamakan upaya konservasi masyarakat adat Pasang dengan di Desa Patuli, Bali. “Di Desa Patuli Bali itu ada juga larangan mengganggu keberadaan kuntul karena berdampak pada keseimbangan alam. Bagi yang melanggar juga ada sanksi adatnya.”

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tulisan ini diambil dari Mongabay, Situs Berita dan Informasi Lingkungan dan dapat dibaca pada link berikut
<http://www.mongabay.co.id/2016/05/23/desa-pasang-surga-bagi-burung-bangau-di-sulse/>

Gurita Tak Hidup di Kolam Susu

*Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupimu
Tiada badai tiada topan kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu*

- Koes Plus



Oleh Arpan Rachman

LAGU di atas syairnya seperti mengingkari kenyataan. Wajar kalau Presiden Sukarno dulu tidak suka dengan grup musik yang kemudian populer di masa jaya kediktatoran Orde Baru ini. Syair lagu Kolam Susu terkesan bagaikan sebuah halusinasi yang hendak membodohi imajinasi kita semua.

Lautan bukan kolam susu seperti kata lagu Koes Plus, dulu. Kail dan jala kadang kala tidak cukup menghidupi kaum nelayan yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.

Di laut, bila angin ribut, mereka kerap menantang maut: menghadapi badai topan yang mengamuk. Tapi nelayan harus terus bertarung nyawa demi menghidupi keluarga. Juga tidak selamanya ikan dan udang datang menghampiri mata kail yang dipasang umpan.

Nelayan pun tidak selamanya mencari ikan. Contohnya Azis, umurnya 33 tahun. Dia tinggal di Pulau Barrang Caddi, Makassar, Sulawesi Selatan.

Dia lebih suka menangkap gurita. Sehari-hari di bawah ombak tenang, angin baik, dan cuaca cerah, dapat dia tangkap 10 sampai 15 kilogram gurita. “Ada pengepul di pulau. Saya jual ke mereka Rp30 ribu per kilogram,” katanya.

Gurita dia cari di perairan sekitar pulau tempat tinggalnya. Perburuannya dimulai kala fajar menyingsing pukul lima pagi hingga siang pukul 11 sebelum matahari naik ke puncak langit. Di atas perahu katinting, Azis memandang ke laut lepas sambil berdiri gagah

mengintai mangsa laksana Sinbad Si Pelaut yang legendaris.

Tanpa teman, dia berburu, selama enam jam penuh. Menaiki perahu tradisional yang banyak dimiliki nelayan asal Bugis-Makassar. Katinting, berbadan panjang dan ramping. Baling-baling kecil di buritan perahu yang berputar dengan tenaga solar seolah musik instrumental yang mengiringi pelayarannya mengarungi riak gelombang Selat Makassar.

Gurita tak perlu dipancing dengan umpan atau cacing. Menangkapnya hanya perlu melemparkan kepiting palsu yang terbuat dari timah. Beratnya 1,6 kilogram, sehingga langsung tenggelam di dasar laut setelah disambitkan. Boneka kepiting timah itu memiliki enam kaki yang dipasang besi bengkok berujung runcing persis mata pancing. Umpan itu diikat ke tali nilon yang digenggam erat di tangan. Bila gurita “memakannya”, Azis bergerak menarik tali, sang gurita sudah terjerat tak bisa lari.

“Gurita suka makan kepiting batu yang bersembunyi di sela-sela batu di dasar laut. Jadi, kami buat ini kepiting-kepitingan yang mirip kepiting batu,” ujarnya.

Hidupnya di sela bebatuan di dasar lautlah yang membuat kepiting jenis itu disebut “kepiting batu”. Dan gurita biasa memangsa kepiting batu memang.

Tinggal di Pulau Barrang Caddi, menjadi nelayan, itulah hidup Azis. Pulau itu berada dalam Kepulauan Spermonde yang berjumlah

DI LAUT, BILA ANGIN RIBUT, MEREKA KERAP MENANTANG MAUT: MENGHADAPI BADAI TOPAN YANG MENGAMUK. TAPI NELAYAN HARUS TERUS BERTARUNG NYAWA DEMI MENGHIDUPI KELUARGA. JUGA TIDAK SELAMANYA IKAN DAN UDANG DATANG MENGHAMPIRI MATA KAIL YANG DIPASANG UMPAN



Gurita suka makan kepiting batu yang bersembunyi di sela-sela batu di dasar laut. Jadi, para nelayan membuat kepiting-kepitingan yang mirip kepiting batu

Foto: Arpan Rachman

120 gugusan pulau dan berserakan di sepanjang sisi luar Selat Makassar. Letaknya di koordinat 50 4' 25.272" Lintang Selatan dan 1190 19' 14.373" Bujur Timur. Wilayah administrasinya termasuk dalam kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Banyak wisatawan sering mampir ke sana sekadar berenang di pantainya atau menuju beberapa titik yang eksotik untuk menyelam. Dermaga pulau ini dapat dicapai dalam 15 menit berlayar dari Pelabuhan Kayu Bangkoa, Makassar. Perahu hilir-mudik membawa penumpang melintasi selat, setiap hari. Ongkosnya hanya Rp15 ribu per orang.

Tampak di dekat pantai, beberapa penduduk telah mendirikan galangan, membuat perahu sendiri buat dijual. Mereka menemukan teknik baru merekatkan bilah-bilah papan dan

menyatukannya sebagai badan perahu supaya tidak lekas bocor: mencampurkan serat seluloid dengan lem. Serat dan lemnya dibeli dari Surabaya. Campuran lem-seluloid itu ditempel ke sela bilah-bilah papan supaya terekat menyatu tanpa celah.

Di bagian selatan pulau telah berdiri kilang. Sufri Laude aktivis sosial yang sejak lama mendampingi penduduk Pulau Barrang Caddi dan sering berkelana ke berbagai kawasan pesisir di Indonesia, berinisiatif membangun instalasi penyulingan air bersih. Niatnya sangat mulia agar para penduduk Pulau Barrang Caddi tidak lagi tergantung pada air bersih yang dibeli dari Makassar. Kilang-kilang penyulingan air bersih itu sudah diinstal, proses menyuling air laut menjadi air tawar tinggal menghitung hari.

Dan Azis terus melaut. Memburu gurita bukan di kolam susu. Bersama boneka kepiting timah yang setia. Ia suka bersenandung, tapi tak mau menyanyikan lagu Koes Plus.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah volunteer di globalvoices.org. Dapat dihubungi di email: sungaimerah2@gmail.com



Memperkuat Peran Sosial Kesatuan Pengelolaan Hutan

Oleh **Azmi Sirajuddin**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Menhut-II/2010, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sulawesi Tengah akan dibangun sebanyak 21 unit, dengan total luas 3.199.08 ha. Terdiri dari KPH Lindung sebanyak 5 unit seluas $\pm$ 717.427 ha, serta KPH Produksi sebanyak 16 unit seluas $\pm$ 2.481.659 ha. Saat ini sudah terbangun 8 unit KPH, dengan luas areal 1.197.885 ha, 3 unit di antaranya adalah KPH lintas kabupaten. Salah satu tujuan dari pembentukan KPH di setiap daerah ialah mendekatkan pelayanan kehutanan kepada komunitas, serta memperluas kemitraan kehutanan di tingkat tapak.

Ilustrasi : Ichsan Djunaed

Dalam perkembangannya, tujuan tersebut seperti sulit diwujudkan. Mengingat masih banyak variabel ataupun indikator yang tidak terpenuhi di lapangan. Padahal, dari variabel kebijakan pendukungnya, keberadaan KPH sangat kuat secara legal – formal, melalui instrumen Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Variabel kebijakan lainnya, di level daerah RPJMD Sulawesi Tengah Tahun 2011 – 2016 paralel dengan kebijakan Kemenhut tersebut. Artinya, terdapat sinkronisasi kebijakan di tingkat nasional dan sub nasional, sehingga tidak ada kendala hukum.

Namun realitasnya, dukungan kebijakan saja tidak cukup membantu peran KPH. Agar peran KPH di level tapak sesuai harapan, diperlukan kapasitas yang handal di pihak pengelola KPH itu sendiri. Kapasitas tidak hanya kecakapan pengetahuan teknis kehutanan, juga diperlukan kemahiran manajerial keorganisasian, serta yang terpenting ialah kepekaan sosial terhadap realitas di sekitar wilayah kelola KPH.

Mengapa kepekaan sosial sangat mendesak bagi pengelola KPH? Karena KPH berada tepat di hadapan masyarakat, di jantung pengelolaan hutan di level paling mikro, yang kita sebut dengan level tapak. Sebab, di level tapak inilah tersebar unit-unit sosial kesatuan masyarakat, yang kita sebut lipu, ngapa, ngata, kampung ataupun desa.

Jika merujuk sensus Departemen Kehutanan bersama dengan BPS tentang Potensi Desa (PODES) tahun 2008, di Sulawesi Tengah dari total 1.686 desa, terdapat 58 desa tepat berada di dalam kawasan hutan, 666 desa di tepi kawasan hutan, serta 962 desa di luar kawasan hutan. Artinya, jika

digabungkan desa-desa yang berada di dalam dan di tepi kawasan hutan, maka terdapat 724 desa di Sulawesi Tengah yang lokasinya bersinggungan langsung dengan kawasan hutan. Dengan total luas areal mencapai 3,7 juta hektar, dengan jumlah penduduk lebih dari 800.000 jiwa atau sekitar 33% dari total populasi Sulawesi Tengah.

Mereka yang terdapat di 724 desa tersebut berkepentingan langsung dengan sektor kehutanan. Dengan tiga pola utama sebagai ciri ketergantungan terhadap sumber daya hutan. Pertama, komunitas atau kelompok masyarakat yang masih berladang dan meramu hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebagai basis produksi. Mereka ini umumnya hidup di wilayah dataran tinggi seperti komunitas Wana Posangke di sekitar Cagar Alam Morowali. Kedua, komunitas yang masih meramu hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, damar, madu alam, namun juga sudah mengenal komoditi tambahan, misalnya kakao, cengkeh dan kopi. Seperti komunitas Tampo Pekurehua di Lembah Napu. Ketiga, komunitas yang sudah tidak meramu hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta lebih fokus kepada praktek wanatani (agroforestri) dengan komoditas unggulan tertentu misalnya kopi, pala, kemiri, durian, rambutan, langsung, dan memanfaatkan hutan sebagai pemberi jasa lingkungan untuk sumber air, seperti komunitas Kaili Daa di Lampo, Donggala.

Saran Perbaikan Kepada KPH

Realitas semacam itulah yang mesti dibaca dan dipahami oleh para pengelola KPH di berbagai tempat. Sebab lulus tidaknya KPH sebagai ikon kehutanan di level tapak tergantung pada



kemampuan para pengelola KPH berdialektika dengan dinamika sosial di sekitarnya. Agar KPH dapat terkelola sesuai spirit awalnya, maka KPH mesti melakukan koreksi bahkan otokritik terhadap pendekatannya selama ini.

Salah satu cara, dengan lebih memperhatikan fungsi sosial KPH ketimbang fungsi bisnisnya. Misalnya, setiap penyusunan rencana pengelolaan hutan (RPH) baik yang menengah dan berjangka panjang, seharusnya menerapkan prinsip *free prior and informed consent* (FPIC). Yaitu, prinsip pelibatan pendapat dan sikap komunitas setempat secara bebas terkait suatu perencanaan pembangunan di wilayahnya. Hal ini sudah menjadi ketentuan global, melalui kesepakatan di pembicaraan iklim (UNFCCC/COP 16) di Cancun, Mexico pada tahun 2010, yang mana keputusan tersebut juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Hal lain, di dalam agenda-agenda kerja yang terumuskan melalui dokumen RPH tersebut, sebaiknya juga mencantumkan agenda kerja yang bersentuhan langsung dengan kepentingan komunitas sekitar KPH. Misalnya, penataan blok pemanfaatan KPH sebaiknya dibarengi dengan identifikasi wilayah kelola rakyat (ladang, kebun, sawah, mukim). Sehingga dapat terpetakan dengan jelas tidak hanya batas-batas terluar KPH, namun juga sebaran titik-titik produksi komunitas. Hal ini akan membantu dan mempermudah pengelola KPH dalam menyusun data dasar potensi kawasan. Sekaligus menghindari sejak dini konflik klaim kelola dan tumpang tindih penguasaan, pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan, jika suatu

saat pihak KPH mengalokasikan sebahagian blok untuk program produksi ataupun untuk kepentingan konservasi.

Selain itu pula, pihak pengelolaa KPH mesti banyak mempromosikan prospek perhutanan sosial di wilayah tugasnya. Sebagai perbandingan, saat ini pemerintah secara nasional sudah mencanangkan skema perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar, dapat berupa hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, maupun hutan adat. Saat ini, total areal yang sudah dipromosikan untuk perhutanan sosial di Sulawesi Tengah mencapai 200.000 hektar, yang tercantum di dalam Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial (PIAPS). Beberapa usulan yang tercantum di PIAPS tersebut berasal dari KPH yang ada di Sulawesi Tengah.

Namun, kita berharap dari 8 unit KPH yang sudah berdiri saat ini di Sulawesi Tengah, akan lebih giat lagi mempromosikan skema perhutanan sosial, sebagai bahagian dari bentuk kepekaan sosialnya terhadap komunitas setempat. Juga sebagai bentuk upaya memperbaiki tata kelola kehutanan di level tapak. Terpenting, lebih intensifnya pihak KPH di level tapak menggiatkan skema perhutanan sosial akan mengubah citra buruk sebelumnya. Dari orientasi bisnis dan konservasi semata, kepada lebih berorientasi sosial. Inilah yang kita harapkan, adanya perubahan paradigma pengelolaan kehutanan di level tapak.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis Adalah Manajer Program Yayasan Merah Putih Sejak 2014
Tulisan ini diambil dari website Yayasan Merah Putih (YMP) dan bisa
dibaca di <http://www.ymp.or.id/memperkuat-peran-sosial-kesatuan-pengelolaan-hutan/>



Ilustrasi : Ichsan Djunaed

SOSOK

Tenri

**Jurnalis, Aktivis,
dan Birokrat**



Jika seorang advokat atau aktivis organisasi non pemerintah (Ornop) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menelpon polisi, jaksa, dan hakim mempertanyakan kasus hukum seorang perempuan atau anak, tentu merupakan hal yang biasa. Advokat bisa saja menjadi pengacara dari perempuan atau anak yang menjadi korban atau terjerat masalah hukum. Sedangkan aktivis Ornop/LSM sudah umum menjadi pendamping atau pekerja sosial yang mendampingi dan mengadvokasi berbagai permasalahan perempuan dan anak.

Yang tidak biasa kalau itu dilakukan oleh seorang birokrat atau pegawai pemerintah. Terlihat agak aneh bila seorang birokrat menelpon polisi atau jaksa menanyakan proses hukum, di mana pelaku atau korbannya adalah perempuan atau anak. Walaupun sesama pegawai pemerintah dan aparat negara, namun kepolisian dan kejaksaan adalah institusi hukum yang berbeda dengan birokrasi negara non hukum.

Struktur dan sistem kerja kepolisian, kejaksaan, dan institusi hukum lainnya dianggap independen, tidak bisa dipengaruhi, apalagi diintervensi oleh pihak luar. Independensi institusi hukum diperlukan agar penegakan hukum memihak pada keadilan, tidak tunduk pada pengaruh dan tekanan.

Sayangnya, penegak hukum tidak selalu mempunyai ilmu dan perspektif yang cukup dalam menegakkan hukum. Perempuan, anak, kelompok disabilitas, dan masyarakat miskin sering menjadi korban dan dikorbankan, karena perspektif penegak hukum yang buruk.

Karena itu, kalangan aktivis, akademisi, jurnalis, dan berbagai lembaga tidak hanya ikut terlibat dalam upaya peningkatan kapasitas penegak hukum, tetapi juga mengadvokasi berbagai kebijakan dan kasus yang merugikan kelompok-kelompok marjinal, termasuk perempuan dan anak. Namun, advokasi juga telah menjadi bahasa yang akrab di lembaga-lembaga pemerintah. Jadinya aneh “pemerintah mengadvokasi pemerintah”.

Akan tetapi, permasalahan perempuan dan anak tidak bisa diselesaikan dengan advokasi saja. Permasalahan perempuan dan anak meliputi berbagai aspek yang lebih luas dan kompleks karena terkait dengan budaya patriarki dan diskriminasi berbasis gender. Karena itu, sedikit sekali perempuan—apalagi birokrat—yang peduli terhadap perempuan dan anak, sekalipun berada di posisi yang memungkinkan untuk melakukan sesuatu untuk perempuan dan anak.

Jurnalis dan Aktivis

Dan di antara sedikit birokrat itu adalah Andi Tenri Ampa Palallo, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Kota Makassar. Perempuan lincah dan gesit ini sebelumnya dikenal sebagai seorang jurnalis dan aktivis. Sejak 1992 telah menjadi wartawan Harian Fajar dan hingga saat ini adalah salah satu wartawan seniornya. Di tengah kesibukannya yang padat sebagai birokrat di Pemerintah Kota Makassar, Bu Tenri atau Kak Tenri—demikian sering disapa—masih menyempatkan diri untuk sesekali menulis di Harian Fajar. Dia juga telah menulis beberapa buku dan modul mengenai keluarga berencana, hak dan perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, pemilihan umum, dan hubungan masyarakat.

**PEKERJAAN PARA CAMAT, LURAH,
DAN KETUA RT/RW ADALAH
MELAYANI PUBLIK, NAMUN TIDAK
BISA DIPUNGKIRI BAHWA MEREKA
MASIH MENUNJUKKAN DIRI MEREKA
DI MASYARAKAT SEBAGAI RAJA-RAJA.
BELUM SEMUA APARAT BIROKRASI
DARI YANG TERENDAH HINGGA
TERTINGGI MENEMPATKAN DIRINYA
SEBAGAI ABDI NEGARA DAN
SEBAGAI PELAYAN PUBLIK**



Karena berlatar belakang jurnalis dan aktivis itulah, dua Walikota Makassar—Ilham Arief Sirajuddin dan Moh. Ramadhan Pomanto—mengangkat dan memercayakan-nya mengurus Bagian Humas (Hubungan masyarakat) Pemerintah Kota Makassar. Tenri menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemerintah Kota Makassar pada Februari 2013-Februari 2015. Sebelumnya, selama sekitar 10 bulan Tenri menjabat sebagai Kasubag (Kepala sub bagian) Pengaduan Masyarakat Bagian Humas Kota Makassar.

Ketika menjabat sebagai Kabag Humas, Magister Sosiologi lulusan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar ini melakukan beberapa terobosan yang cukup inovatif. Humas benar-benar melakukan tugas dan fungsi pelayanan publik dalam bidang komunikasi dan informasi. Humas Pemerintah Kota Makassar di masa Tenri juga mengisi beberapa “ruang kosong” yang sebelumnya terabaikan, namun strategis. Humas Pemerintah Kota Makassar melakukan kegiatan sosialiasi, workshop, dan pelatihan mengenai Pelayanan Publik untuk para camat,

Ibu Tenri diantara anak-anak

Sumber Foto : Koleksi Pribadi

lurah, dan ketua RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga).

Menurut alumni Ilmu Komunikasi Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar ini, camat, lurah, dan ketua RT/RW adalah pihak pemerintah yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan publik, namun mereka tidak dibekali pengetahuan dan ketrampilan yang cukup mengenai pelayanan publik. Pekerjaan para camat, lurah, dan ketua RT/RW adalah melayani publik, namun tidak bisa dipungkiri bahwa mereka masih menunjukkan diri mereka di masyarakat sebagai raja-raja. Belum semua aparat birokrasi dari yang terendah hingga tertinggi menempatkan dirinya sebagai abdi negara dan sebagai pelayan publik.

Berawal dari Penyuluh

Perempuan yang lahir di Lamakkojo, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo 12 April 1971 ini menamatkan pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Kolaka, Sulawesi

SEBAGAI JURNALIS SENIOR, TENRI MENDIDIK BEBERAPA JURNALIS MUDA DI HARIAN FAJAR SEHINGGA MEREKA MENJADI JURNALIS YANG SELALU MENGANGKAT ISU-ISU PEREMPUAN DAN ANAK

Tenggara. Tahun 1985 menamatkan pendidikan dasar di SD (Sekolah Dasar) Negeri Atula, tahun 1988 lulus pada SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri Ladongi, kemudian tahun 1991 lulus di SMU (Sekolah Menengah Umum) Negeri 1 Rate-Rate, Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Menikah dengan Andi Yudha Yunus, salah satu aktivis Ornop (organisasi nonpemerintah) senior, dan diamanahi tiga putri: Andi Nurdini Yuridna Yudha, Andi Nurul Annisa Yudha, dan Andi Youmil Ikezummy Yudha.

Tenri memulai karier di pemerintah sebagai pegawai BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional) di Kabupaten Wajo pada tahun 1996. Tahun 1999 pindah ke Kantor BKKBN Kota Makassar. Selama di BKKBN, Tenri dikenal sebagai penyuluh, yang tidak hanya menyuluh mengenai Keluarga Berencana, tetapi juga mengenai perlindungan anak dan perempuan.

Sebagai jurnalis, penyuluhan yang dilakukan Tenri tidak hanya melalui tatap muka, tetapi juga melalui media massa di Harian Fajar. Itu menjadi keunggulannya karena isu-isu mengenai keluarga berencana, perempuan, dan anak bukanlah isu yang seksi bagi media massa. Di samping itu, hingga pertengahan tahun 2000-an hampir tidak ada wartawan atau penulis yang mendalami isu-isu tersebut.

Peduli Anak dan Perempuan

Sebagai jurnalis, Tenri bergabung dengan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Sulawesi Selatan. Sedangkan sebagai aktivis, Tenri adalah anggota dan pengurus beberapa lembaga di antaranya: SP (Solidaritas Perempuan) Anging Mammiri, anggota KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Sulawesi Selatan, pengurus FPMP (Forum Pemerhati Masalah Perempuan), pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan, dan pendiri Institut Saribattang.

Tahun 2004-2008 Tenri menjabat sebagai anggota komisi di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Makassar, dan pada 2008-2009 menjabat anggota komisi di KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Pengetahuan, pengalaman, dan jaringan yang luas menjadikan Tenri mampu bersaing untuk

menduduki kursi di KPU Kota Makassar dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Namun, Tenri tetaplah seorang yang peduli terhadap perempuan dan anak. Sepanjang kariernya sebagai jurnalis dan birokrat, Tenri selalu meluangkan waktunya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Ketika menjadi konsultan di Plan Internasional—sebuah lembaga anak internasional—Tenri aktif mengurus anak jalanan dan pemulung di Kota Makassar.

Dia terlibat aktif mengadvokasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui lembaga-lembaga yang peduli pada perempuan dan anak. Berbagai kasus perempuan dan anak diangkatnya menjadi berita penting di Harian Fajar. Sebagai jurnalis senior, Tenri mendidik beberapa jurnalis muda di Harian Fajar sehingga mereka menjadi jurnalis yang selalu mengangkat isu-isu perempuan dan anak. Harian Fajar juga menjadi Koran yang lebih sensitif dalam menulis berita mengenai perempuan dan anak. Analisis Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan mengenai media cetak yang terbit di Kota Makassar menyebutkan bahwa, sejak tahun 2006, beberapa media cetak di Kota Makassar, terutama Fajar, sangat aktif memberitakan isu-isu anak, serta pemberitaannya mulai sensitif dan berpihak pada hak-hak anak (Tristiana et al., 2008).

Sejak Februari 2015, Tenri menjabat sebagai Kepala BPPPA Kota Makassar. Posisi yang tugas pokok dan fungsinya telah menjadi “pekerjaan” dan kepedulian Tenri selama ini. Dengan jabatan tersebut, Tenri bertekad memperkuat kebijakan dan advokasi pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Makassar. Tenri mulai mensinergikan potensi-potensi yang tersedia untuk itu. Apalagi lembaga-lembaga yang peduli, mengurus, dan mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak, juga telah menjadi “habitat” Tenri selama ini. (***)

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Database dan Publication Media Officer BaKTI-MAMPU



Buruh Tembakau Anak-anak Menderita Demi Keuntungan Perusahaan Terkena bahaya nikotin, pestisida

Ribuan anak di Indonesia, beberapa baru umur 8 tahun, bekerja dalam kondisi membahayakan kesehatan di berbagai lahan pertanian tembakau, menurut Human Rights Watch dalam laporan hari ini. Berbagai perusahaan rokok Indonesia dan multinasional membeli tembakau di Indonesia, namun tak cukup memastikan bahwa anak-anak tak terlibat pekerjaan berbahaya dari pemasok mereka.

Laporan 124 halaman, “‘Panen dengan Darah Kami’: Bahaya Buruh Anak di Pertanian Tembakau di Indonesia,” mendokumentasikan bagaimana buruh anak terpapar nikotin,



Bocah perempuan mengikat daun tembakau ke tongkat untuk persiapan pengeringan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Sumber : <https://www.hrw.org/id/news/2016/05/24/290012>
 © 2015 Marcus Bleasdale untuk Human Rights Watch

menangani bahan kimia beracun, menggunakan benda tajam, mengangkat beban berat, dan bekerja di panas ekstrim. Pekerjaan ini punya konsekuensi jangka panjang untuk kesehatan dan pertumbuhan mereka. Pemerintah harus melarang pemasok yang memanfaatkan anak-anak untuk pekerjaan dengan kontak langsung dengan tembakau, dan pemerintah Indonesia harus mengatur industri ini untuk bertanggungjawab.

“Perusahaan tembakau menghasilkan uang dari pinggang dan kesehatan buruh anak,” ujar Margareth Wurth, peneliti hak-hak anak Human Rights Watch dan penulis laporan ini. “Perusahaan rokok semestinya tak berkontribusi dalam penggunaan buruh anak pada pekerjaan berbahaya dalam pasokan mereka.”

Indonesia merupakan produsen tembakau terbesar kelima di dunia, dengan lebih dari 500,000 pertanian tembakau. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan lebih dari 1,5 anak usia 10 hingga 17 tahun bekerja di pertanian di Indonesia. Human Rights Watch tak bisa menemukan perkiraan resmi jumlah anak yang bekerja di pertanian tembakau.

Human Rights Watch bikin penelitian lapangan di empat provinsi, termasuk tiga provinsi yang menghasilkan hampir 90 persen produksi tembakau Indonesia: Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Laporan ini berdasarkan wawancara dengan 227 orang, termasuk 132 buruh anak usia 8 hingga 17 tahun. Sebagian besar mulai bekerja sejak usia 12 tahun, sepanjang musim tanam, di lahan-lahan kecil yang diolah oleh keluarga atau tetangga mereka.

Sepuluh anak-anak yang diwawancarai mengeluh mual, muntah, sakit kepala, atau pusing, semua gejala yang konsisten dengan keracunan nikotin kronis karena penyerapan nikotin melalui kulit mereka. Efek jangka panjang untuk hal ini belum diteliti, namun penelitian tentang

merokok menunjukkan bahwa paparan nikotin selama masa kanak-kanak dan remaja dapat mempengaruhi perkembangan otak.

“Ayu” seorang anak umur 13 tahun mengatakan, dia muntah-muntah setiap tahun saat panen tembakau di desanya dekat Garut, Jawa Barat: “Saya muntah-muntah saat saya terlalu lelah karena panen dan membawa daun (tembakau). Saya muntah berkali-kali.”

Banyak buruh anak mengatakan mereka ikut mencampur dan memakai pestisida dan bahan kimia lainnya. Paparan pestisida sudah lama diketahui punya efek kesehatan jangka panjang dan kronis termasuk masalah penafasan, kanker, depresi, defisit neurologi, dan masalah kesehatan



reproduksi.

“Argo” anak usia 15 tahun di Pamekasan, Jawa Timur, mengatakan dia tiba-tiba merasa sakit saat menyemporkan pestisida di pertanian tembakau milik keluarga: “Suatu kali saya muntah. Waktu itu saat musim tanam, dan saya tak menggunakan masker. Baunya kuat sekali, saya mulai muntah-muntah.” Beberapa anak juga terpapar pestisida saat pekerja lain menyebarkan bahan kimia di ladang dimana mereka bekerja, atau di ladang terdekat.

Sedikit sekali dari anak-anak yang diwawancarai, atau orangtua mereka, memahami risiko kesehatan. Mereka juga praktis sedikit dilatih tentang langkah-langkah melindungi keselamatan mereka dari bahaya pestisida. Pemerintah Indonesia harus melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko kesehatan anak-anak yang bekerja di pertanian tembakau, kata Human Rights Watch

Sebagian besar anak-anak yang diwawancarai bekerja di luar jam sekolah, namun Human Rights Watch menemukan bahwa bekerja di pertanian tembakau mengganggu sekolah untuk beberapa anak.

Meski undang-undang nasional dan internasional melarang anak di bawah umur 18 tahun melakukan pekerjaan berbahaya, ribuan anak bekerja dalam kondisi penuh risiko di pertanian tembakau di Indonesia.

Sumber : <https://www.hrw.org/id/news/2016/05/24/290012>

© 2015 Marcus Bleasdale untuk Human Rights Watch

“Sari” umur 14 tahun, dari Magelang, Jawa Tengah, mengatakan dia bercita-cita menjadi seorang perawat, namun dia berhenti sekolah saat kelas enam sekolah dasar untuk membantu keluarganya.

Indonesia punya beberapa industri besar tembakau termasuk tiga pabrik rokok nasional—PT Djarum, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Nojorono Tembakau International—dan dua perusahaan multinasional—PT Bentoel International Investama, yang dimiliki British American Tobacco, dan PT Hanjaya Mandala Internasional Investama yang dimiliki Phillip Morris International. Kelima perusahaan ini membeli tembakau yang ditanam di Indonesia.

Human Rights Watch membagikan temuannya kepada 13 perusahaan, dan 10 perusahaan memberi tanggapan. Namun tak satupun dari

INDONESIA MERUPAKAN PRODUSEN TEMBAKAU TERBESAR KELIMA DI DUNIA, DENGAN LEBIH DARI 500,000 PERTANIAN TEMBAKAU. ORGANISASI BURUH INTERNASIONAL (ILO) MEMPERKIRAKAN LEBIH DARI 1,5 ANAK USIA 10 HINGGA 17 TAHUN BEKERJA DI PERTANIAN DI INDONESIA.

perusahaan Indonesia memberikan tanggapan rinci atau komprehensif, dan dua perusahaan besar, Djarum dan Gudang Garam, tak menanggapi meski berulang kali dihubungi.

Sejak 2013, Human Rights Watch telah bertemu dan bersuratan dengan perwakilan beberapa perusahaan rokok multinasional mengenai kebijakan buruh anak dan praktiknya. Human Rights Watch sebelumnya mendokumentasikan buruh anak yang ada di pertanian tembakau di Amerika Serikat, dan mendesak perusahaan rokok di sana ambil langkah konkret untuk menghapus buruh anak dari rantai pemasok mereka. Beberapa telah mengadopsi perlindungan baru untuk buruh anak, namun tak satupun punya kebijakan yang cukup untuk memastikan semua anak di rantai pemasok mereka terlindungi.

Di bawah norma-norma hak asasi manusia, perusahaan tembakau bertanggungjawab memastikan tembakau yang mereka beli tak diproduksi dengan buruh anak, kata Human Rights Watch.

Sebagian besar tembakau di Indonesia dibeli dan dijual di pasar terbuka melalui pedagang dan perantara, di mana tembakau sering melewati banyak tangan sebelum dibeli oleh perusahaan rokok nasional atau multinasional. Namun, beberapa petani, ada yang berada di bawah kontrak langsung dengan perusahaan rokok.

Perusahaan multinasional yang memberi tanggapan pada Human Rights Watch memprioritaskan pemasok dengan kontrak langsung mereka. Namun, semua juga membeli tembakau di pasar terbuka, dan tak ada jejak di mana pasar tembakau terbuka diproduksi, dan bagaimana kondisinya.

Human Rights Watch tak menemukan bukti bahwa berbagai perusahaan rokok Indonesia punya langkah-langkah untuk mencegah buruh anak di rantai pasokan mereka, dan mereka tak menanggapi korespondensi atau mau bertemu dengan Human Rights Watch.

“Ketika perusahaan-perusahaan rokok bahkan tak tahu dari mana tembakau yang mereka beli,

mereka tak punya cara untuk memastikan buruh anak tak punya risiko kesehatan dalam memproduksi tembakau,” kata Wurth.

Menurut hukum Indonesia, 15 tahun adalah usia minimum untuk bekerja, dan anak-anak usia 13 hingga 15 tahun hanya boleh melakukan kerja ringan, yang tak mengganggu sekolah atau membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Anak-anak di bawah usia 18 tahun dilarang melakukan kerja berbahaya, termasuk di lingkungan dengan zat kimia berbahaya. Pekerjaan yang melibatkan kontak langsung dengan tembakau harus dilarang berdasarkan ketentuan ini, karena risiko terpapar nikotin, kata Human Rights Watch.

Indonesia berada di bawah pengawasan internasional karena gagal melindungi anak-anak dari bahaya merokok. Meskipun hukum Indonesia melarang penjualan produk tembakau kepada anak-anak, hampir empat juta anak-anak usia 10 hingga 14 tahun menjadi perokok setiap tahun, dan setidaknya 239.000 anak di bawah 10 tahun sudah mulai merokok. Lebih dari 40 juta anak Indonesia di bawah 15 tahun terpapar asap rokok.

Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang belum menandatangani Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebuah perjanjian kesehatan global yang bertujuan untuk melindungi warga dari konsekuensi konsumsi tembakau dan paparan asap rokok. Indonesia harus menandatangani dan meratifikasi perjanjian ini tanpa ditunda lagi, kata Human Rights Watch.

“Pemerintah harus melakukan lebih banyak lagi untuk melindungi anak-anak dari bahaya konsumsi tembakau,” kata Wurth. “Tapi buruh tembakau anak adalah korban tersembunyi, dan mereka juga sangat butuh dilindungi.”

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tulisan ini diambil dari laman Human Rights Watch dan dapat dibaca pada link <https://www.hrw.org/node/290012>
Laporan ‘Panend dengan Darah Kami: Bahaya Buruh Anak di Pertanian Tembakau’ dapat dilihat pada link berikut
<https://www.hrw.org/id/report/2016/05/24/289933>



Lika-Liku Listrik di Kamanggih

*Twists and Turns of
Electric Power
in Kamanggih*

Oleh **Syaifullah**

Saya berusaha memenuhi paru-paru dengan oksigen sebanyak mungkin, serakus-rakusnya. Tapi tetap saja rasanya kurang. Saya masih tersengal-sengal sambil berusaha memaksa kaki terangkat, menjejaki satu demi satu anak tangga dari bebatuan hingga tiba di dataran tempat mobil terparkir. Keringat mengucur deras, membasahi kaus yang saya kenakan. Saya yakin wajah saya pucat karena energi yang terkuras deras.

Siang itu bersama Umbu Hinggi Panjanji, saya dibawa melihat langsung reaktor pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Lokasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) itu memang agak jauh dari pusat Desa Kamanggih. Dengan mobil double gardan, kami menyusuri jalan kecil berbatu, naik turun bukit sekira 30 menit. Dengan mobil double gardan saja perjalanan terasa sulit, apalagi dengan mobil biasa. Bisa dipastikan perjalanan harus terhenti di tengah jalan.

Tiba di sebuah tanah datar yang dipenuhi rerumputan tinggi, mobil harus berhenti. Kami turun dan meniti anak tangga bebatuan menuju pusat reaktor PLTMH. Sesi pertama membutuhkan 28 anak tangga dari batu dan tanah sebelum sampai di sebuah bendungan kecil. Tapi intinya bukan di situ, kami masih harus meniti 98 anak tangga ke bawah, ke tempat reaktor PLTMH itu berada. Anak tangganya dibuat dari campuran semen dan batu yang dibuat seadanya, sama sekali tidak memenuhi kaidah arsitektur. Pijakan tangga tidak seragam dan dibuat begitu saja, di satu sisi terbentang kabel tembaga besar sebagai railing tangga, sekadar sebagai tempat berpegang agar tak terjerembab ke samping.

Ada dua orang anak muda yang bertugas sebagai operator PLTMH itu. Mereka adalah tenaga lepas yang digaji oleh PLN untuk menjaga pembangkit listrik di Kamanggih. Total ada empat orang petugas di desa itu, dua lainnya bertugas di pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang berada di atas, lebih dekat ke arah desa.

“Kami bergantian seminggu sekali,” kata Rahmat, salah seorang petugas di PLTMH Kamanggih. Kata pria muda itu juga, suplai listrik ke Desa Kamanggih sebagian besar dilayani oleh PLTMH, PLTD hanya membantu saja. “Setiap jam enam sore sampai jam sepuluh malam, PLTD juga dinyalakan untuk melayani beban puncak,” ujarnya.

Menjual Listrik ke PLN

PLTMH Kamanggih dibangun sejak Januari 2011 atas bantuan dari Humanistichinstituut Voor Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS) bekerjasama dengan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA). PLTMH ini akhirnya diresmikan bulan November 2011 dan melayani 350 rumah di Desa Kamanggih.

I was trying my hardest to fill my lungs with as much oxygen as I could, as greedy as I could. But somehow, I still feel less. I was gasping for air, as I was trying to force my legs to climb one rung at a time from the rocks until I reach the plateau where the car was parked. I was sweating profusely as I soaked the shirt I was wearing. I was convinced my face went pale because I ran out of energy.

I was with Umbu Hinggi Pajanji that afternoon. He took me to inspect micro-hydro electric power plant in Kamanggih Village, Kahaungu Eti Sub-District, East Sumba District, East Nusa Tenggara. The location of the micro-hydro power plant is indeed far from the village of Kamanggih. With a double-axle car, we drove through a small, rocky pathway of roads, up and down of hills for thirty minutes of time. Even with a double-axle car, we found the journey to be highly challenging, much less had we used a regular car. Without a doubt that our car would not have worked and stopped in the middle of the small, rocky road.

We arrived in a flat land with plenty of tall grass as the car stops. We climbed and went down the rocky stairway towards the central reactor of the micro-hydro power plant. The first section of the stairway requires twenty-eight steps of rock and soil before reaching a small dam. However, the end point was far from the first section, as we had to climb down the ninety-eight staircase down to the reactor where the power plant located. The steps are made of improvised cement and stones; it was anything but meeting the principles of proper architecture. The planks were not adequately constructed, and a large copper wire was stretched as staircase railing, serving as a place to hold so nobody will not fall.

Two young men are assigned as operators of the power plant. They serve as freelancers hired by the Power Company (PLN) to keep the power plant of Kamanggih. There are four officers working in the village, and two others were assigned at Diesel Power Plant, located further up of the location, towards the village area.

“We take turns once a week”, said Rahmat, one of the officers at Kamanggih micro-hydro power plant. He further said that electric supply to the village of Kamanggih is provided by the micro-hydro power plant, while the diesel power plant serves as an additional supply. “Diesel power plant is activated every six o'clock in the evening to ten o'clock at night, to serve the peaking hours.” He added.



Petugas mencatat meteran produksi di reaktor listrik

PLTMH. Foto: Syaifullah

Pengelolaan listrik kemudian diserahkan kepada koperasi Jasa Peduli Kasih, sebuah koperasi warga yang sudah ada sejak tahun 1999. Sebelum mengelola listrik, koperasi ini hanya mengelola hasil bumi warga Desa Kamanggih, mengelola air bersih serta memberikan fasilitas simpan pinjam bagi anggotanya. Sejak PLTMH beroperasi, kerjaan mereka bertambah dengan mengurus pemeliharaan, distribusi hingga penarikan iuran listrik setiap bulan.

Sejak Desember 2013, pengelolaan PLTMH kemudian berpindah tangan, dari koperasi ke PLN. Saat itu koperasi Jasa Peduli Kasih akhirnya menandatangani kerjasama dengan PLN menyangkut pengelolaan dan distribusi PLTMH Kamanggih.

“PLN awalnya tidak tahu kalau ada pembangkit listrik di sini. Pejabat PLN baru tahu dari media karena acara peresmian yang mengadirkan bupati dan anggota DPRD dimuat di media,” kata Umbu Hinggi Panjanji yang juga adalah ketua koperasi Jasa Peduli Kasih sejak tahun 2013. Dari penuturannya, PLTD dari PLN sebenarnya sudah ada dan beroperasi sejak 2010 di Desa Kamanggih, tapi tidak mampu melayani semua penduduk di desa.

Informasi tentang PLTMH di Desa Kamanggih yang akhirnya sampai ke telinga pejabat PLN kemudian ditindaklanjuti dengan rencana kerjasama. PLN bersedia mengambilalih pengelolaan PLTMH termasuk pemeliharaan,

Selling electric power to PLN

Kamanggih micro-hydro power plant was established since January 2011 by the support of Humanistichinstituut Voor Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS) in collaboration with Institute of People's Business and Economy (IBEKA). This power plant was launched in November 2011, serving 350 households in the village of Kamanggih.

Power management was then handed over to Cooperative of Jasa Peduli Kasih, people's collective and organised effort which has been founded since 1999. Before managing the power plant, this cooperative was only managing the produce and crops of the village of Kamanggih, managing clean water, and providing savings and credits to its members. Since the establishment of the power plant, their scope of work was multiplied as they administer the maintenance, distribution and people's power bills every month.

Since December 2013, management of the power plant was handed over again from the Cooperative to the PLN. Jasa Peduli Kasih signed a collaboration with PLN with regards to management and distribution of electricity from the micro-hydro power plant in Kamanggih.

“PLN was not initially aware of a power plant here. PLN officials were made aware by the news covered by local media after the official launching of the power plant by the Regent and members of the local parliament.” Said Umbu Hinggi Pajanji, a man who serves as the head of cooperative Jasa



Baterai inilah yang membuat warga Kamanggih kuatir.

Foto: Syaifullah

distribusi dan penarikan iuran. Setiap bulan koperasi akan mengajukan penagihan ke PLN berdasarkan pemakaian yang ditunjukkan meteran produksi.

“Komunikasi sudah dibangun sejak 2011, tapi MoU baru ditandatangani di Desember 2013,” kata Umbu Hinggi. Pria yang juga anggota DPRD Sumba Timur ini kemudian melanjutkan, “Sebelum interkoneksi, warga yang sudah berlangganan listrik kepada PLN tetap pakai PLN, begitu juga dengan warga yang berlangganan listrik kepada koperasi. Setelah interkoneksi, kami semua akhirnya sepakat jadi pelanggan PLN. 115 pelanggan listrik koperasi beralih ke PLN dengan gratis ditambah dengan 200 lebih pelanggan PLN. Semua akhirnya pakai listrik dari PLTMH.”

Sebelum interkoneksi, koperasi hanya menetapkan iuran seragam kepada para pelanggannya. Pengguna listrik 0,5 Ampere dikenakan biaya Rp.20.000,- sebulan dan 2 Ampere lebih tinggi lagi. Iuran tidak didasarkan pada jumlah pemakaian. Listrik waktu itu pun hanya dialirkan di malam hari, alasannya karena di siang hari sebagian besar warga beraktifitas di luar rumah. Setelah interkoneksi listrik sudah mengalir 24 jam dan pembayaran disesuaikan dengan pemakaian yang dicatat di meteran listrik.

Sandungan di Tagihan Listrik

Saat menandatangani perjanjian dengan PLN, pihak koperasi Jasa Peduli Kasih sebenarnya

Peduli Kasih since 2013. From his statements, diesel power plant established by PLN was operated since 20104 in the village of Kamanggih, but unable to serve the entire village population.

Information regarding micro-hydro power plant in Kamanggih Village was spread out quickly, including PLN officials, who then followed up with a collaboration plan. PLN was ready to take over the management of the power plant, including the maintenance, distribution and bills due from household users. Every month, cooperative will submit to PLN billing in relevance with usage indicated by the metered production.

“We have built communication since 2011, but we only managed to sign the MoU in December 2013,” said Umbu Hinggi. The man, who is also a member of East Sumba District Parliament further notes, “Before the interconnection, citizens who use PLN for electricity will stay as PLN users, the same with citizens who use power provided by cooperative. After the interconnection, we all agreed that everybody will be users of PLN. 115 users of cooperative will be turned over to PLN without any charge, along with the existing 200 PLN users. By this, everybody will utilise the electricity provided by the micro-hydro power plant.”

Before interconnection, cooperative applied a uniformity regarding power bills to its users. Users with 0,5 Ampere are charged Rp 20,000,- per month, while users with 2 or more Ampere are charged more. The monthly bill is not anymore



Umbu Hinggi (berkaus putih) menunjukkan aliran sungai sumber PLTMH Kamanggih. Foto: Syaifullah

berharap banyak pada tagihan setiap bulan yang akan mereka ajukan. Harga yang disepakati adalah Rp.475,-/kw. Hitung-hitungan kasarnya, setiap bulan koperasi akan mendapatkan hasil paling sedikit Rp.8 juta bahkan di atas sepuluh juta. Ketika perjanjian sudah berjalan, ternyata harapan itu tidak menjadi kenyataan.

Setiap bulan koperasi hanya menerima pembayaran antara Rp.3 – Rp.4 juta, sesuai dengan listrik yang terpakai oleh warga. Padahal menurut Umbu Hinggi, mesin PLTMH mereka menghasilkan listrik 37kw/menit sementara yang diakui pihak PLN sebagai pemakaian hanya yang benar-benar terpakai oleh warga, jumlahnya tentu jauh di bawah jumlah yang diproduksi mesin PLTMH Kamanggih. Di awal perjanjian, PLN sendiri yang membuat hitung-hitungan kasar tentang pemakaian yang nilainya bisa sampai belasan juta per bulan. Tapi entah kenapa ketika perjanjian berjalan, jumlahnya jauh dari hitung-hitungan tersebut.

“Ini yang jadi masalah sekarang. Sejak Desember 2015 kami belum menandatangani perpanjangan kontrak, menunggu kesepakatan baru,” Ujar Umbu Hinggi.

Pihak koperasi Jasa Peduli Kasih menurut Umbu Hinggi sedang mengajukan rencana revisi perubahan biaya. Mereka meminta biaya per kw

based upon usage. Electricity was only allocated at night time, as most people are not at home during the daylight hours. After interconnection, electricity is now activated for twenty-four hours and payment is adjusted with the relevant use of electricity as stated in the power meter.

Challenges of Electric Bills

At the time of letter signing with PLN, Jasa Peduli Kasih Cooperative initially relied heavily on monthly payments of which they submit. The agreed number was Rp. 475,- per kilowatt. Roughly speaking, the cooperative will earn a minimum of Rp. 8,000,00,- each month, even could reach more than ten million rupiahs. After the signing, the hope did not come into reality.

Every month, the cooperative only received between three to four million rupiahs, in relevance with the amount of electricity used by people. According to Umbu Hinggi, their machines of micro-hydro power plant only produce 35 kilowatt per minute, while PLN only acknowledges as usage is the real amount of electricity used by the people, which number is far below the number of electricity power plant produced. In the commencement of the signing, PLN came up with rough calculation upon usage, which number could exceed to more than ten million rupiahs per month. It is unknown as to why

dinaikkan menjadi Rp.850,-/kw. Pihak koperasi tidak begitu paham pada hal-hal teknis penggunaan listrik tersebut, karenanya mereka meminta pihak teknis untuk melakukan tera ulang pada meteran.

“Sekarang ada 350 rumah yang pakai listrik, ditambah dua tower Telkomsel. Masak sebulan hanya pakai 4000 sampai 6000 kwh?” Tanya Umbu Hinggi. Pria kelahiran 21 Juli 1975 ini melanjutkan, “Kami sebenarnya tidak curiga sama PLN, kami tahu kalau pemakaian meteran listrik pra bayar memang lebih hemat. Tapi kami tetap meminta penjelasan teknis dari PLN soal selisih penghitungan meteran ini.”

Koperasi Jasa Peduli Kasih sudah membuat surat resmi ke PLN tertanggal 28 Desember 2015, tapi sampai April 2016 belum ada balasan. Alasan dari PLN, soal itu adalah wewenang PLN wilayah yang berdomisili di Kupang, ibukota Nusa Tenggara Timur. Sampai sekarang kedua pihak belum menemukan titik terang dari permasalahan tersebut.

“Bagaimana kalau PLN tidak setuju dengan penawaran koperasi?” Tanya saya.

“Ya tidak apa-apa, mereka kita persilakan menarik kembali investasinya. Biar listrik dari PLTMH kami kelola sendiri,” jawab Umbu Hinggi dengan tegas.

Menurut Umbu Hinggi, mereka bisa mendapatkan untung lebih besar dengan mengelola sendiri listrik dari PLTMH karena koperasi juga punya unit usaha lain. Mungkin akan lebih repot, tapi setidaknya untungnya bisa lebih besar. Tapi meski begitu, Umbu Hinggi merasa masih ada harapan dari kerjasama dengan PLN tersebut.

“Kayaknya akan positif, hanya belum ada tanggapan dari pihak PLN wilayah,” kata Umbu Hinggi. “Kalau mereka merasa rugi menarik kembali investasinya, maka mereka pasti akan meneruskan perjanjian tapi mengikuti permintaan kami. Kami hanya minta PLN lebih transparan soal hitung-hitungan ini” lanjutnya.

Kincir yang Bikin Kuatir

Selain pembangkit listrik tenaga mikro hidro, di Desa Kamanggih juga beroperasi pembangkit listrik tenaga angin skala mikro (PLTASM). Di daerah Kalihi yang berkontur perbukitan di tepian desa, 25 buah kincir angin berbaris rapi menantang angin. Angin dari kincir itu diolah menjadi tenaga listrik dengan

that after the agreement is enacted, the number is far below the rough calculation.

“This is the part that is troubling. Since December 2015, we have not signed a contract extension, as we are still waiting for a new agreement,” added Umbu Hinggi.

According to Umbu Hinggi, Jasa Peduli Kasih Cooperative is currently proposing revision plan of payment change. They asked for payment to be increased Rp. 850,- per kilowatt. The cooperative officers do not fully understand technical aspects when it comes to the usage of electricity. Therefore, they ask for technical experts to perform calibration adjustment on the meter.

“We now at the state of 350 houses using electricity, with additional of two Telkomsel towers. It seems impossible that we only use 4,000 to 6,000 kWh,” Umbu Hinggi argued. The man who was born on 21 July 1975 further added, “We do not mean to suspect PLN on anything, we are aware that meter usage for pre-paid electricity is cheaper. We just implore a technical explanation from PLN regarding calculation deviation of this meter.”

The cooperative has issued an official letter to PLN on 28 December 2015 but has not seemed to receive any reply up to April 2016. PLN's excuse was that it was not their authority, as it was the authority of the regional office of PLN residing in the provincial capital of Kupang, East Nusa Tenggara. Up to now, both parties have not found a solution on this constraint.

“How about if PLN disagrees with the proposal from the cooperative?” I asked bluntly.

Umbu Hinggi replies assertively, “That will be alright, they may cancel their investment. We can manage the electricity and the power plant ourselves,”

According to Umbu Hinggi, they can earn even a larger benefit by self-managing the electricity of the micro-hydro power plant, because the cooperative has other business units. He acknowledges that it might be too much for them to handle, but at least they can have bigger profits. Nevertheless, Umbu Hinggi remains confident with the collaboration with PLN.

“I am cautiously optimistic, we just have not had any response from the regional office of PLN,” said Umbu Hinggi. He added, “Should they feel disadvantaged and cancel their investment; they would have to continue the agreement by following our request. We merely ask for PLN to be more transparent regarding these calculations.”

The concerning windmill

In addition to the micro-hydro power plant, the village of Kamanggih has also operated the windmill

bantuan 24 buah baterai.

PLTASM itu dibangun tahun 2013 dan beroperasi sejak tahun 2014. Selain di Kamanggih, di Desa Kaliuhu juga dibangun PLTASM dengan jumlah 20 kincir, sementara di Desa Tanarara 44 unit.

Menurut Umbu Hinggi, PLTASM yang merupakan pilot project itu sebenarnya potensial, hanya sayang biayanya besar. Satu baterai seharga Rp.4 juta, jadi untuk 24 buah baterai total membutuhkan biaya minimal Rp.96 juta.

“Untuk sekarang belum ada masalah, tapi nanti kalau baterainya harus diganti baru masalah. Kami dapat dana dari mana untuk beli baterai baru?” keluh Umbu Hinggi.

Sampai sekarang PLTASM itu hanya bisa melayani 23 rumah, masalahnya karena rumah yang berada di sekitar PLTASM tidak berdekatan. Jarak antara rumah sangat jauh, bahkan terhalang bukit. Setiap bulan warga pengguna listrik PLTASM membayar iuran Rp.20.000,-, jumlah yang tentu saja tidak akan mencukupi biaya operasional apalagi dijadikan modal pembelian baterai nanti.

“Kalau kita tarik Rp.100.000/bulan tiap rumah sebenarnya bisa mencukupi untuk membayar biaya operator tiap bulan dan menabung untuk modal pembelian baterai nanti. Tapi, apa mungkin menagih biaya segitu? Rp.20.000,-/bulan saja rasanya berat untuk sebagian warga,” kata Umbu Hinggi.

Selama ini menurut Umbu Hinggi, penarikan iuran listrik masih berdasarkan rasa kekeluargaan. Warga yang dianggap tidak mampu diberi keringanan dengan membayar saat punya uang, entah ketika selesai panen atau sehabis menjual ternak. Meski diberi keringanan, ada juga warga yang nakal, tidak membayar bahkan ketika sudah punya dana. Untuk yang nakal ini, dengan sangat terpaksa listrik mereka diputus sementara sampai mereka membayar kembali.

“Kita sama-sama mengertilah, ini kan sistim kekeluargaan. Untuk listrik PLTASM ini koperasi tidak ambil untung, bahkan sistimnya subsidi silang,” kata Umbu Hinggi.

PLTASM ini menurut Umbu Hinggi masih menjadi beban bagi koperasi Jasa Peduli Kasih, bukan dianggap sebagai salah satu cara mencari keuntungan. Beban operasional belum sebanding dengan biaya yang didapatkan setiap

power plant. In the hillside area of Kahili, situated on the outskirts of the village, 25 windmills were lined up, challenging the winds. The wind produced by the mills are processed into electric power by utilising 24 batteries.

The windmill power plant was built in 2013 and operated since 2014. In addition to Kamanggih, the village of Kaliuhu and Tanarara also have windmill power plants, each with 20 and 44 units of windmills.

Umbu Hinggi states that windmill power plant was initially a potential pilot project, but they require a lot of operational costs. The price of one battery is four million rupiahs, which means it will require a minimum of Rp. 96,000,000 for a total of 24 batteries.

“We have no major constraint for now. But when the current batteries run out, they need replacement. Where will we get the money from?” Umbu Hinggi complains.

Currently, windmill power plant could only serve 23 households, mainly because houses in the proximity of windmill power plant are not close to each other. The distance between one house and another is so far, some of them have hills in between them. Every month, users of windmill power plant pay a monthly fee of Rp 20,000,-, a payment which obviously not enough to cover the high operational cost, much less being used to buy new batteries in the future.

“We actually can manage to cover monthly operator and to save for batteries should we charge Rp,100,000 per month per house. But is it feasible? Even for Rp 20,000 per month is a little worrisome for a lot of people,” Umbu Hinggi added.

Umbu Hinggi further states that electricity bills have been applied based on kinship. Residents who are deemed incapable of paying will be exempted from paying when they have money, or after they have completed harvest or after selling livestock. Despite being imposed with relief, In spite of this assistance, there have been reports that people are still refused to pay even though they already have money. For this instance, their electricity will be temporarily disconnected until the time they make their payment.

“We operate this system based on kinship, so people should understand the situation. For this windmill power plant, the cooperative does not obtain extra profit; we have a cross-subsidy system,” said Umbu Hinggi.

Windmill power plant, according to Umbu Hinggi, still constitutes a burden for Jasa Peduli Kasih Cooperative, as the power plant does not serve as profit taking endeavour. The operational cost of the windmill power plant does not equal to the monthly payments

bulan. Berbeda dengan di Kamanggih, PLTASM di Tanarara dianggap lebih ringan karena sudah bisa mengalirkan listrik ke 70an rumah. Setidaknya beban operasional hampir sepadan dengan biaya bulanan yang dibayar oleh warga.

Keberadaan PLTASM Kalihi buat koperasi Jasa Peduli Kasih masih dianggap membawa rasa kuatir, kuatir akan beban operasional per bulan dan biaya penggantian baterai suatu saat nanti ketika baterai yang sekarang tidak bisa berfungsi lagi.

Berani Menjual Listrik

Listrik, bagi masyarakat modern sudah jadi salah satu kebutuhan mendasar. Kadang kala listrik bahkan dijadikan simbol kesejahteraan, tanpa listrik seseorang atau bahkan sebuah wilayah dianggap masih terbelakang. Sayangnya, belum semua daerah di Indonesia bisa menikmati listrik. Tri Mumpuni Wiyatno, staff ahli kementerian ESDM seperti yang dikutip dari laman Republika.co.id mengatakan saat ini masih ada 30 ribu desa lebih di Indonesia yang belum menikmati listrik.

Masalahnya beragam, dari ketiadaan sumber daya energi hingga kesulitan medan. Warga Desa Kamanggih, Sumba Timur sudah membuktikan kalau mereka tak kuatir pada sumber daya energi. Air yang mengalir sepanjang tahun dan angin yang berhembus sepanjang hari bisa mereka ubah menjadi energi listrik yang mengalir ke rumah-rumah warga.

Mereka pun cukup percaya diri menjual listrik dari PLTMH ke pihak PLN dengan segala kesulitannya. Meski mengaku tak paham betul soal teknis, mereka juga berani bersuara ketika merasa ada yang tidak transparan pada proses tata kelola listrik di desa mereka. koperasi Jasa Peduli Kasih menegakkan kepala, percaya diri mengajukan opsi negosiasi ke perusahaan negara yang bertanggung jawab penuh pada pengadaan listrik di negeri ini.

Warga Kamanggih bukan sekadar pengguna, mereka tahu kalau mereka juga adalah penyedia dan karenanya mereka percaya diri. Meski jalan itu berliku-liku.

from users. In contrary with Kamanggih, windmill power plant in Tanarara is considered to be lighter because it can supply power to 70 houses. At least operational expenses are almost worth the monthly fees paid by the residents.

The establishment of Kahili windmill power plant still concerns for Jasa Peduli Kasih Cooperative, as they worry about the operational cost per month and the cost of batteries replacement someday when the current batteries are not functioning.

Brevity of Selling Electricity

Electricity, for modern society, has become one of the most primary needs. Sometimes electricity serves as a symbol of welfare, as without electricity, one or a region is still considered poor or disadvantaged. Unfortunately, not all regions in Indonesia are supplied by electricity. Tri Mumpuni Wiyatno, technical staff of the Ministry of Energy and Mineral Resources, as quoted by Republika.co.id, stated that there are still 30 thousand villages in Indonesia which are not supplied with electricity.

This is derived out of various background problems, from the unavailability of resources to challenging terrain. Residents of Kemanggih Village of East Sumba District has proven that they are not concerned for energy resources as water flows throughout the year and the winds that blow throughout the day, which they could process into electrical energy to be supplied into people's houses.

They also convinced that they can sell electricity from the micro-hydro power plant to PLN, even with all of its challenges. Despite acknowledging of their lack of technical knowledge, they still confident to voice their opinions when there is a lack of transparency process of the power management. The Cooperative of Jasa Peduli Kasih held their heads up high and confident that they are able to propose negotiation to the national electrical company who should be ultimately accountable for electricity provision of this country.

The citizens of Kamanggih are not merely users of electricity; they are acutely aware that they are also providers. Thus, they remain confident in their paths. In spite of its twists and turns along the way.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan info lebih lanjut hubungi info@bakti.or.id

Replikasi Praktik Cerdas melalui kegiatan Berbagi Pengetahuan

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Indonesia memiliki prioritas agenda pembangunan yang mencakup bidang maritim, infrastruktur dasar, energi listrik, keamanan, dan kesehatan. Sejalan dengan agenda tersebut, Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional Bappenas bekerjasama dengan *Knowledge Sector Initiative* (KSI) Australia, beserta Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan *United Cities Local Government-Asia Pacific* (UCLG ASPAC) berinisiatif untuk mengembangkan *Knowledge Center* (KC).

KC merupakan *repository* (penyimpanan) praktik cerdas yang sifatnya terpusat, dinamis dan terintegrasi. KC berfungsi sebagai penyedia pengetahuan dan solusi serta sebagai pusat pembelajaran melalui kumpulan pembelajaran, publikasi dan praktik-praktik cerdas (pengalaman pembangunan yang terbukti berhasil). KC bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan nasional dan daerah berbasis bukti dalam rangka meningkatkan pembangunan melalui knowledge sharing dan lesson learned yang dapat memberikan solusi yang mudah diadopsi. Untuk mengimplementasikan KC, pilot project replikasi praktik cerdas dipilih sebagai solusi.

Dari serangkaian kegiatan KC, terpilih dua praktik cerdas yang akan direplikasi dalam pilot project yaitu:

- 1 Pengelolaan TPA Wisata Edukasi Talangagung, Kabupaten Malang yang akan direplikasi di Kabupaten Wakatobi.

- 2 BUMDes Pengelolaan Air Bersih di Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur yang akan direplikasi di Desa Sari, Kecamatan Sape, Kab. Bima.

Persiapan replikasi telah dimulai dengan:

- 1 Pengumpulan informasi praktik cerdas dari beberapa kabupaten/kota di Indonesia
- 2 Lokakarya penyusunan tools untuk menilai praktik cerdas melalui survey lapangan di daerah praktik cerdas
- 3 FGD dan survey lapangan
- 4 Lokakarya supply analysis untuk menganalisis hasil survey lapangan sehingga terpilih dua (2) praktik cerdas yang akan direplikasi, yaitu:
 - BUMDES Pengelolaan Air di Lendang Nangka, Kab. Lombok Timur
 - TPA Wisata Edukasi Talangagung di Kabupaten Malang
- 5 Mempertemukan pemilik praktik cerdas yang terpilih dengan daerah yang akan mereplikasi, terutama untuk menilai kesesuaian kondisi di daerah yang akan mereplikasi (*compatibility assessment*)
- 6 *Readiness assessment* untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan daerah yang akan mereplikasi praktik cerdas termasuk *capacity building* yang dibutuhkan.

Sebagai kelanjutan proses replikasi, Tim KC melaksanakan Pelatihan Teknis yang dilaksanakan di daerah asal praktik cerdas (Malang dan Lombok Timur) dan Pelatihan Manajemen (Lokakarya Replikasi) di daerah yang akan mereplikasi (Wakatobi dan Bima).



PELATIHAN TEKNIS PRAKTIK CERDAS PENGELOLAAN TPA WISATA EDUKASI TALANGAGUNG

Sepuluh orang peserta pelatihan teknis replikasi praktik cerdas dari Wakatobi bersama tim UCLG, BaKTI dan BAPPENAS memadati ruang pertemuan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Mulyoagung yang terletak di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau, Malang. Sebagian mereka ada yang duduk melingkar di tengah ruangan sebagian lagi memilih melihat-lihat hasil kerajinan daur ulang serta melihat-lihat dokumentasi foto-foto yang terpajang di dinding ruang pertemuan.

Kunjungan ke TPST Mulyoagung adalah bagian dari kegiatan Pelatihan Teknis Replikasi Praktik Cerdas Pengelolaan Sampah TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Wisata Edukasi Talangagung yang dilaksanakan pada tgl 27-29 April 2016.

Pada hari pertama pelatihan teknis diawali dengan pemaparan gambaran umum praktik cerdas TPA Wisata Edukasi oleh inisiatornya sendiri yakni Bapak Koderi. Selama kurang lebih 3 jam, Pak Koderi menjelaskan mulai dari latar belakang hingga manfaat yang dirasakan dari keberadaan praktik cerdas ini. Di akhir sesi, peserta saling berbagi pemahaman mereka dan mempresentasikan ke narasumber untuk mendapat penilaian akan tingkat pemahaman. Selain Pak Koderi, di hari pertama pelatihan juga dihadiri oleh Pak Renung. Pak Renung juga merupakan salah satu inisiator praktik cerdas ini. Ia memaparkan mengenai tahapan-tahapan operasional TPA yakni Controlled Landfill, TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle), Waste to Energy dan Wisata Edukasi. Untuk tahapan *Waste to Energy*, SOP (Standar

Pelatihan Teknis Replikasi Praktik Cerdas Pengelolaan Sampah TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Wisata Edukasi Talangagung. Foto : Dok. Yayasan BaKTI

Operasional Pelaksanaan) pemanfaatan gas metana diputuskan untuk dijelaskan langsung saat kunjungan ke TPA.

Pada hari kedua, setelah mengunjungi TPST Mulyoagung dan menyaksikan langsung proses pengolahan sampah dari mulai masuk ke dalam TPST, pemilahan, pengepakan, dan pengelolaan serta pemanfaatan hasil pemilahan, peserta pelatihan kemudian bertolak ke TPA Talangagung yang berlokasi di kecamatan Kepanjen. Memasuki kawasan TPA ini, peserta yang mengendarai bus pariwisata berkapasitas kurang lebih 30 seat disuguhi pemandangan yang menyejukkan. Sepanjang mata memandang adalah hamparan perkebunan tebu yang menghijau. Memasuki gerbang TPA, dengan sedikit menanjak pohon-pohon besar nan rindang berdiri tegak di kiri kanan jalan. Beberapa gazebo, taman dan bahkan air mancur juga ada. Mobil dan motor pengangkut sampah hilir mudik. Pelatihan teknis yang berlangsung selama tiga hari akan dilanjutkan dengan Lokakarya Replikasi yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2016 di Wakatobi.

Lokakarya Replikasi Praktik Cerdas "TPA Wisata Edukasi Talangagung, Kabupaten Malang" oleh TPA Wambeamale, Kabupaten Wakatobi

Lokakarya ini diselenggarakan selama empat hari, 17-20 Mei 2016 di Patuno Resort, Wakatobi dan merupakan lanjutan dari Pelatihan Teknis yang sebelumnya dilaksanakan pada tgl 27-29 April 2016 di Malang.

Kegiatan ini dihadiri oleh peserta yang mengikuti pelatihan teknis di Malang yang



merupakan wakil dari Dinas Kebersihan Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Wakatobi, serta SKPD terkait lainnya, tokoh adat dan komunitas. Hadir sebagai nara sumber praktisi praktik cerdas TPA Wisata Edukasi Talangagung, Bapak Renung dan Bapak Rudy. Selain itu dihadirkan pula pengelola TPA Puuwatu Kendari yang juga berbagi pengalaman mereka dalam mengelola TPA yang merupakan hasil replikasi dari TPA Talangagung Malang.

Pada pelatihan ini peserta sepakat untuk menetapkan:

- 1 Visi pengelolaan sampah: layanan dan indikator keberhasilan layanan
- 2 Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan sampah
- 3 Struktur organisasi dan rancangan sumber daya manusia pendukung
- 4 Rencana anggaran biaya operasional TPA
- 5 Rencana tindak lanjut implementasi SOP

Selain itu, peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke TPA Wambeamale – Wanci, Wakatobi. Evaluasi paska kunjungan dan observasi terhadap kondisi terkini di TPA Wambeamale menghasilkan beberapa masukan realistis dari peserta terhadap peluang layanan untuk perbaikan pengelolaan TPA. Peluang-peluang ini menghasilkan sebuah visi yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk alat kendali berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) dan rencana operasional TPA Wambeamale Kab. Wakatobi.

Pada hari ke-3 pelatihan hadir pula, Bupati Wakatobi, Bapak Hugua yang memberikan arahan

dan motivasi kepada SKPD dan peserta yang hadir terkait pentingnya komitmen dan kesungguhan hati dalam proses replikasi ini.

PELATIHAN TEKNIS PRAKTIK CERDAS BUMDES PENGELOLAAN AIR LENDANG NANGKA

Kegiatan pelatihan teknis replikasi praktik cerdas “BUMDes Pengelolaan Air Bersih di Lendang Langka berlangsung selama 3 (tiga) hari, 2-4 Mei 2016 di Senggigi, Lombok. Pelatihan teknis replikasi ini diikuti oleh perwakilan dari Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Kepala Desa Sari dan pengurus pengelola air Desa Sari. Hadir juga pada kegiatan ini inisiator praktik cerdas BUMDes Pengelolaan Air Bersih di Lendang Langka.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan praktik cerdas BUMDes Pengelolaan Air Bersih di Lendang Nangka, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada pihak yang akan mereplikasi, Desa Sari, Kab. Bima. Adapun pelatihan pada hari pertama meliputi penjelasan dari pihak inisiator mengenai profil praktik cerdas, pengelolaan dan pelayanan air bersih, serta perencanaan dan implementasi pengelolaan layanan air oleh BUMDes Lendang Nangka Sejahtera (Lentera).

Kunjungan lapangan ke BUMDes Pengelolaan Air Bersih Lendang Nangka, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur berlangsung pada hari ke-2 untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan melihat kondisi empiris mengenai sistem pengelolaan air bersih, kelembagaan BUMDes,



Kegiatan pelatihan teknis replikasi praktik cerdas “BUMDes Pengelolaan Air Bersih di Lendang Langka di Senggigi, Lombok (kiri) dan Lokakarya untuk kegiatan yang sama yang dilanjutkan di Desa Sari, Kab. Bima
Foto : Dok. Yayasan BaKTI

serta kebijakan terhadap manajemen pengelolaan keuangan BUMDes di Lendang Nangka.

Selanjutnya pelatihan teknis replikasi yang dilaksanakan pada hari ketiga meliputi pengelolaan BUMDes dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh peserta setelah kunjungan lapangan ke BUMDes Pengelolaan Air Bersih Lendang Langka. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta serta mendorong sinergitas antar stakeholders terkait (Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah Desa Sari, Badan Permusyawaratan Desa Sari, dan masyarakat Desa Sari, Kabupaten Bima).

Peserta berkomitmen untuk menindaklanjuti kegiatan pelatihan teknis yang telah dilakukan dengan mereplikasi serta mengembangkan pembelajaran yang diterima dari Desa Lendang Nangka untuk dapat mengatasi tantangan pengelolaan air bersih di Desa Sari Kabupaten Bima.

LOKAKARYA REPLIKASI PRAKTIK CERDAS “BUMDES PENGELOLAAN AIR DESA LENDANG NANGKA” OLEH DESA SARI, KABUPATEN BIMA

Lokakarya ini merupakan lanjutan dari Pelatihan Teknis yang berlangsung pada tanggal 2-4 Mei 2016 di Senggigi, NTB. Lokakarya ini dihadiri oleh 44 orang yang terdiri dari Bappeda, Dinas

Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Kepala Desa Sari dan pengurus pengelola air Desa Sari, wakil dari kecamatan Sape dan Wawo, Kab. Bima. Hadir pula Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri, Wakil Bupati Bima, dan Kepala Bappeda Bima pada pembukaan lokakarya replikasi.

Lokakarya ini diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta baik dari Desa Sari, Kecamatan Wawo dan Sape, dan Pemkab. Bima. Peserta dari Pemkab Bima memberi masukan dan saran untuk pengembangan pengelolaan air di Desa Sari yang diharapkan dapat menjadi desa percontohan bagi desa-desa lain di Kab. Bima dalam hal pengelolaan air dan manajemen BUMDes. Peserta dari Desa Sari datang dengan tekad yang bulat untuk memperbaiki pengelolaan air mereka yang sudah cukup lama bermasalah, terutama pada aspek pemerataan dan manajemen pengelolaan.

Dalam lokakarya ini, peserta berhasil mengidentifikasi model usaha pengelolaan air menggunakan *Business Model Canvas*. Identifikasi dilakukan dengan melihat layanan yang sudah berjalan saat ini dan peserta diharapkan dapat menggunakan alat yang sama ketika BUMDes Maja Labo Dahu, Desa Sari berencana menambah produk layanan air, misalnya air kemasan.

Selain itu peserta juga mengembangkan struktur organisasi pengelolaan air oleh BUMDes Desa Sari. Peserta menamakan organisasi ini sebagai “Unit Pengelolaan Air” yang berada dan menjadi satu dalam struktur organisasi BUMDes Maja Labo Dahu. Selain itu peserta juga bersama-sama membuat deskripsi pekerjaan dan kualifikasi staf BUMDes Maja Labo Dahu - Unit Pengelolaan Air dan komponen-komponen *Standard Operating Procedure* (SOP) Unit Pengelolaan Air BUMDes Maja Labo Dahu.

Peserta dari Desa Sari yang menghadiri lokakarya ini menyampaikan bahwa dokumen yang dihasilkan dari lokakarya ini akan disosialisasikan ke Ketua BPD Desa Sari. Draft SOP perlu dikonsultasikan dengan seluruh Tim Replikasi Praktik Cerdas yang terdiri dari perwakilan dari PemKab Bima dan Kecamatan Sape dan Wawo.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai Program ini, hubungi info@bakti.or.id

Artikel

Kaimana, Surga Energi Alternatif dari Ujung Timur Indonesia

Dewasa ini cadangan minyak bumi semakin menipis. Keadaan ini terjadi karena sampai sekarang manusia masih bergantung pada salah satu jenis energi yang tidak lain yaitu bahan bakar minyak (BBM). ditengah keterbatasannya, BBM sendiri masih menjadi primadona pada setiap sektor kehidupan. Di sisi lain, kebutuhan energi terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Hal inilah yang terjadi di Kaimana, salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Papua Barat. Kebutuhan akan energi listrik di wilayah ini semakin meningkat. Situasi-situasi seperti inilah yang akhirnya memaksa manusia mencari energi alternatif lain pengganti minyak bumi. Telah banyak negara maju yang berlomba-lomba menciptakan inovasi serta teknologi baru yang mampu menggantikan posisi minyak bumi sebagai sumber energi utama.

Provinsi Papua Barat merupakan provinsi termuda pada NKRI. Jumlah penduduk Papua Barat sebanyak 702.202 jiwa dengan luas wilayah 125.093 km². Sebagian besar masyarakatnya hidup miskin di pedesaan yang letaknya di pedalaman.

<http://batukarinfo.com/referensi/subnational-health-care-financing-reforms-indonesia>

Referensi



Subnational Health Care Financing Reforms in Indonesia

Publikasi The SMERU Research Institute

Indonesia has seen an emergence of local health care financing schemes over the last decade, implemented and operated by district governments. Often motivated by the local political context and characterized by a large degree of heterogeneity in scope and design, the common objective of the district schemes is to address the coverage gaps for the informal sector left by national social health insurance programs. This paper investigates the effect of these local health care financing schemes on access to health care and financial protection. Using data from a unique survey among District Health Offices, combined with data from the annual National Socioeconomic Surveys.

The study is based on a fixed effects analysis for a panel of 262 districts over the period 2004–2010, exploiting variation in local health financing reforms across districts in terms of type of reform and timing of implementation. Although the schemes had a modest impact on average, they do seem to have provided some contribution to closing the coverage gap, by increasing outpatient utilization for households in the middle quintiles that tend to fall just outside the target population of the national subsidized programs. However, there seems to be little effect on hospitalization or financial protection, indicating the limitations of local health care financing policies. In addition, we see effect heterogeneity across districts due to differences in design features.

<http://batukarinfo.com/referensi/subnational-health-care-financing-reforms-indonesia>



Modul Pelatihan Menjadi Orang tua dambaan anak ini merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Unicef

Modul ini terdiri dari 5 bagian yaitu:

1. Siapkah Menjadi Orang Tua?
2. Perkembangan Anak
3. Cerdas Berkomunikasi dengan Anak
4. Disiplin bagi Anak
5. Perlindungan Anak

<http://www.batukarinfo.com/referensi/parenting-skill- menjadi-orang- tua-dambaan- anak>



Kegiatan di BaKTI

26 Mei 2016

News Café

Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi melalui SMSBunda

Kegiatan Diskusi News Café SMSBunda diselenggarakan oleh LemINA (Lembaga Mitra Ibu dan Anak) bekerjasama dengan Yayasan BaKTI dan Dinas Kesehatan Makassar atas dukungan JHPIEGO-GE Foundation, mengambil tema “Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi Melalui SMSBunda”. Hadir selaku narasumber adalah Wirda A-Sie KIA Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Istiyani Purbaabsari dari SMSBunda-JHPIEGO Jakarta, serta dipandu oleh Moderator-Luna Vidya.

Usulan “KASIH” lahir dari proses diskusi yang menarik antara Jurnalis, Blogger dan Narasumber. Diakui oleh Daeng Gassing, bahwa masih banyak suami beranggapan bahwa urusan kehamilan menjadi tanggungjawab isteri-ibu hamil saja, sedangkan suami-ayah kurang memberi perhatian lebih. Padahal menurut narasumber Wirda, kehadiran pendamping/suami saat perempuan/ibu melahirkan sangatlah membantu menguatkan isteri saat persalinan. Senada dengan itu, Istiyani dari SMSBunda pusat menghimbau kepada seluruh Jurnalis dan Blogger untuk membantu



mempromosikan pendaftaran SMSBunda kepada masyarakat luas dengan narasi yang kuat dan menggugah, sehingga Ibu hamil. Ibu Baduta dan keluarganya tertarik ikut mendaftar SMSBunda, cukup dengan mengetik “SMSBunda” kirim ke 08118469468. Gratis!”

Hal utama lainnya adalah bagaimana mengadvokasi Pemerintah Daerah untuk mereplikasi atau melanjutkan SMSBunda, pasca program selesai. “Jurnalis dan Blogger memegang peranan penting dalam membangun opini Pemerintah dan Masyarakat. Dengan narasi yang kuat, kita berharap Pemerintah bisa melanjutkan program ini, sehingga kemanfaatan SMSBunda makin lama dinikmati masyarakat”, ungkap Isty. Kegiatan New Café ini diikuti oleh peserta dari kalangan jurnalis, LSM, dan masyarakat umum.

21 Juni 2016

Canada's International Assistance Review-Makassar Consultation Roundtable

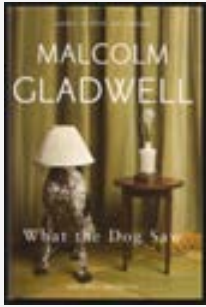
Kementerian Luar Negeri Kanada, Perdagangan Internasional dan Kerjasama Pembangunan Internasional Kanada melaksanakan Konsultasi Publik di Makassar sehubungan dengan bantuan kerjasama pembangunan dari Kanada. Tujuannya adalah untuk mengkaji ulang kebijakan-kebijakan serta program-program Kanada dalam rangka untuk memahami secara lebih baik serta respon terhadap tantangan dan kesempatan pada konteks global yang baru.

Kajian ini merupakan sebuah kesempatan untuk mengidentifikasi kekuatan Kanada dalam upaya membawa bantuan internasional, bagaimana memanfaatkan kekuatan itu untuk mendorong inovasi, dan cara terbaik untuk mencapai hasil. Diskusi ini juga akan melihat bagaimana Kanada dapat menggunakan sumber daya terbaik untuk mengatasi tantangan dalam bantuan internasional global dan membawa dampak sebesar mungkin dengan melihat suatu pendekatan dan kemitraan baru yang inovatif. Selain itu juga mempertimbangkan pelajaran dari upaya-upaya sebelumnya termasuk kesuksesan maupun kendala yang dihadapi.



Diskusi ini dihadiri oleh sekitar 29 pelaku pembangunan yang pernah dan saat ini menjadi mitra dalam Program Kerjasama Pembangunan Kanada di Sulawesi Selatan. Pada konsultasi publik ini ada 4 tema yang didiskusikan yakni 1) Keseluruhan bantuan internasional Kanada, 2) Kesehatan dan Hak-hak Perempuan dan Anak-anak, 3) Pertumbuhan Ekonomi yang bersih dan Perubahan Iklim, 4) Tata Kelola Pemerintahan, Pluralisme, dan Hak Asasi Manusia.

Diskusi ini dipandu oleh Ibu Sharon Armstrong, Direktur Kerjasama Pembangunan Global Affairs Canada. Dalam diskusi ini peserta memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi bagi pemerintah Kanada dalam kerangka bantuan internasional dan kebijakan agar bantuan Kanada dapat betul-betul tepat sasaran.



What the Dog saw

PENULIS Malcolm Gladwell

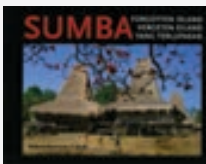
Buku ini berisi kompilasi 19 artikel Malcolm Gladwell yang awalnya diterbitkan di The New Yorker yang dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, obsessives, pioner, dan varietas lain dari Genius kecil, menggambarkan orang-orang yang ahli di bidangnya, tetapi tidak selalu terkenal. Bagian dua, Teori, Prediksi, dan Diagnosis, menggambarkan masalah prediksi. Bagian ini mencakup masalah seperti kegagalan intelijen, dan jatuhnya Enron. Bagian ketiga, Kepribadian, Karakter, dan Intelijen, membahas berbagai topik psikologis dan sosiologis.



Jurnal Perempuan; RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

PENERBIT Yayasan Jurnal Perempuan

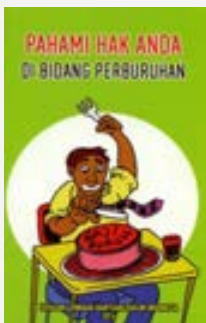
Pusat data dan informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia 2010-2014 mengungkapkan ada lebih dari 21 juta kasus pelanggaran hak anak termasuk kasus kekerasan seksual. Besarnya porsi kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan alarm bagi diajukannya RUU penghapusan kekerasan seksual. Ketiadaan perangkat hukum yang berperspektif korban mendorong RUU ini harus dijalankan.



SUMBA; Forgotten Island

PENULIS Robert Ramone

Sumba, sebuah pulau yang memiliki beragam budaya dan tradisi warisan luhur yang bernilai tinggi; sudut-sudut pulau yang mempesona, pantai-pantainya indah alamiah, laut biru bening, sabana yang "garang" serta hutan rimba. Melalui buku ini penulis ingin memperkenalkan Sumba dengan harapan dan mimpi untuk masa depan Sumba yang lebih baik. Buku ini menampilkan panorama serta keunikan budaya dan tradisi yang ada dan hidup di Sumba dalam bentuk foto dan esai.



Pahami Hak Anda di Bidang Perburuhan

PENERBIT Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Hukum perburuhan seyogyanya lebih menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Semua hak-hak normatif dan proses bagaimana hubungan kerja terjalin antara pekerja dan pengusaha termasuk mekanisme perselisihan dan perburuhan yang melibatkan lembaga peradilan secara singkat dan sederhana diuraikan dalam buku ini.